

Nasionalisasi Pengetahuan Sejarah: Meninjau Kembali Agenda Penulisan Sejarah Indonesiasentris, 1945-1965

Gani A. Jaelani

Departemen Sejarah & Filologi, Universitas Padjadjaran

Abstracts

This research seeks to elaborate the attempts to nationalize the knowledge of the past in Indonesia between 1945 to 1965. This period is also known as the time when the new perspective in national history writing called Indonesiasentris appeared. At that time, writing national history was a necessary to justify the direction of this new-born state. Accordingly, the so-called Indonesiasentris which was known as the identity of Indonesian historiography, in spite of its contribution to the history as a science, supposes a uniformity of paradigm in national history writing. Far from being true, the Indonesiasentris reflects the heterogeneity of the attempts to interpret the Indonesia's past. This article will try to analyze the genealogy of the Indonesiasentris as a concept; how this concept became the main focus of the debate after the Independence; to which extent this debate was influenced by that in global scale; lastly, this article will try to put in perspective the agenda of writing history in contemporary Indonesian historiography.

Keywords: decolonization, historiography, Indonesian historiography, indonesiasentris, national-history

Pendahuluan

Proklamasi kemerdekaan pada bulan Agustus tahun 1945 merupakan momentum pemisah dari munculnya sikap baru terhadap masa lalu. Sebagai sebuah negara yang baru lahir, Indonesia memerlukan landasan historis untuk menjustifikasi keberadaannya. Itu sebabnya mengapa sejarah sebagai sebuah ilmu menempati posisi yang sangat penting dalam proses pembentukan semangat kebangsaan ini. Demikian, dalam kurun

waktu dua puluh tahun, dari 1945 sampai 1965, sejumlah karya yang diterbitkan pada periode itu berusaha untuk memberi pembenaran historis bagi negara yang baru lahir ini.

Pergulatan dalam mendefinisikan masa lalu Indonesia pada masa ini kerap dinamai sebagai upaya merumuskan Sejarah Indonesiasentris. Sampai batas tertentu, sekalipun tidak memberi banyak kontribusi secara keilmuan, Indonesiasentris telah dianggap sebagai identitas historiografi Indonesia. Pemberian label ini mengandaikan satu kesatuan paradigma, sesuatu yang tentu saja tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada masa itu (Purwanto 2006: xii). Sekalipun historiografi Indonesiasentris merupakan sesuatu yang kerap diperbincangkan, pembahasan mengenai hal ini masih sangat sedikit.¹

Berangkat dari kenyataan tersebut, tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis pokok persoalan penulisan sejarah di Indonesia pada periode itu. Ada empat hal yang akan menjadi fokus pembahasan: pertama, asal usul istilah Indonesiasentris dan bagaimana kegemilangan masa lalu Indonesia ditemukan kembali; kedua, bagaimana kedua hal itu menjadi bahan perdebatan pada periode setelah kemerdekaan; ketiga, bagaimana gagasan Indonesiasentris memengaruhi dan dipengaruhi oleh perdebatan di tingkat global; keempat, artikel ini juga akan mengulas apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kebuntuan dalam historiografi Indonesia kontemporer. Tulisan ini didasarkan pada pembacaan teks-teks yang diterbitkan pada periode 1945-1965. Hal ini dilakukan untuk mengisi kekosongan atas kajian empiris dari historiografi Indonesia pada periode itu.

Penemuan Majapahit dan Sriwijaya

Pada tahun 1937, Jacob Cornelis van Leur (1908-1942) menulis sebuah artikel di jurnal *Kolonial Studiën* berjudul “Enkele aantekeningen met betrekking tot de beoefening der Indische gesciedenis” (Catatan terkait studi sejarah Hindia). Sebagaimana tampak dalam judulnya, tulisan ini dimaksudkan sebagai sebuah refleksi teoretis terkait hal-hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan dalam kajian studi sejarah Hindia. Pertama, ia memberi penekanan terkait aspek global dari Indonesia sebagai ruang pertemuan dari berbagai kebudayaan: migrasi awal orang Indonesia kuno, kebudayaan Hindu, kebudayaan Islam, kebudayaan Cina, dan pelayaran orang-orang Eropa (Leur 1960: 122)²; kedua, sebagai konsekuensi ruang pertemuan dari berbagai kebudayaan, karakteristik sumber dan periodisasi yang dimiliki oleh Indonesia menjadi heterogen. Oleh karena itu kerja sama keilmuan dengan filolog dan arkeolog menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan (hlm. 126). Itulah mengapa di mata Van Leur, “sejarah Indonesia adalah sejarah internasional”.

Penerbitan tulisan tersebut, yang mencoba memberi kerangka baru terhadap praktik penulisan sejarah Indonesia, bukan sesuatu yang baru. Tiga tahun sebelumnya, pada

¹ Bambang Purwanto dan Henk-Schulte Nordholt adalah dua dari sedikit sejarawan kontemporer yang mencoba mengulas periode 1945-1965 (lihat Purwanto 2006; Nordholt 2004 dan; Nordholt, Purwanto, and Saptari 2008). Gary van Klinken membahas sedikit dalam artikelnya “The Battle for History After Soeharto: Beyond Sacred Dates, Great Men, and Legal Milestones” (lihat van Klinken 2001: 324–25). Tentu saja tulisan yang lebih lama seperti artikel Taufik Abdullah “The Study of History” (lihat Abdullah 1975) juga salah satu yang pernah membahas periode ini. Begitu pula buku karya H. A. J. Klooster (lihat Klooster 1985) dan kumpulan tulisan yang diedit oleh Anthony Reid dan David Marr (Reid and Marr 1979) merupakan karya-karya yang menyinggung periode yang dibahas dalam periode ini. Meskipun demikian karya-karya yang ada tersebut belum ada yang membahas periode ini secara komprehensif, meletakkan Indonesia dalam silang perdebatan historiografi, dengan topangan penelitian empiris. Itulah yang berusaha dihadirkan dalam tulisan ini.

² Semua kutipan tulisan Van Leur merujuk pada buku *Indonesian Trade and Society: Essays in Asian Social and Economic History*, yang diterbitkan oleh Sumur Bandung tahun 1960.

tanggal 5 Oktober 1934, Van Leur mempertahankan disertasinya yang berjudul *Eenige beschouwingen betreffende den ouden Aziatischen handel* (beberapa refleksi yang mengacu pada perdagangan Asia kuno). Karyanya yang tidak pernah dibicarakan sebelum Perang Dunia II ini, mencoba memperkenalkan penggunaan sumber-sumber baru dan kerangka pemikiran teoretis yang didasarkan pada pemikiran sosiologis-historis Max Weber (Kroef, 1958: 354). Selain itu, refleksi teoretis Van Leur juga ditulis dua tahun sebelum ia menulis kritik terhadap buku Frederick Willem Stapel (1876-1969) yang berjudul *Geschiedenis van Nederlandsch Indië* (Sejarah Hindia Belanda), terdiri dari lima jilid, terbit antara tahun 1938-1940, yang kemudian memunculkan kutipan cukup terkenal, yang merefleksikan karakteristik penulisan sejarah kolonial: “menulis dari geladak kapal, dari balik benteng, dari kaca rumah dagang” (hlm. 21). Kritik ini terdiri dari tiga bagian yang diterbitkan secara terpisah, seiring dengan penerbitan karya Stapel sendiri yang dilakukan secara berkala. Kutipan tadi berasal dari tulisan kedua sebagai kritik atas penerbitan jilid kedua dan ketiga dari *Geschiedenis van Nederlandsch Indië*.

Tulisan-tulisan Van Leur memberi perspektif baru dalam kajian sejarah kolonial. Ia tidak lagi meletakkan penduduk wilayah jajahan sebagai kelompok pasif yang hanya menerima pengaruh dari luar, tapi merupakan agen yang juga aktif dalam membentuk sejarah. Meskipun demikian, studinya terhenti pada abad ke-18; ia juga tidak bisa mengembangkan kerangka teoretis dari model penulisan sejarah yang sudah digagasnya. Pada tahun 1942, di usianya yang ke 34, Van Leur, seorang pegawai kolonial di Hindia Belanda, meninggal dunia, tewas dalam perang di laut Jawa (Wertheim 1954: 167).

Tidak semua peneliti tentang sejarah Indonesia di masa kolonial berkewarganegaraan Belanda seperti Van Leur. Georges Coedès (1886-1969) adalah seorang sarjana Prancis yang banyak melakukan studi tentang pengaruh kebudayaan India di Asia Tenggara. Karyanya yang cukup terkenal adalah *Les Etats hindouisés d'Indochine et d'Indonésie* (Negara-negara Hindu Indocina dan Indonesia), terbit pertama kali tahun 1944. Pada tahun 1918, ia menerbitkan sebuah artikel berjudul “Le royaume de Çrīvijaya” (Kerajaan Sriwijaya) yang cukup penting dalam kajian Sejarah Asia Tenggara, terkait dengan penemuan kembali kerajaan maritim awal di Indonesia: Sriwijaya (Filliozat 1970: 4). Tentu saja penemuan ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, tapi didasarkan pada pembacaan atas artikel karya Johan Hendrik Caspar Kern (1833-1917) tentang sebuah inskripsi di Kota Kapur, bagian barat Pulau Bangka, dalam *Bijdragen tot de taal-, land-, en volkenkunde van Nederlandsch-Indië*, tahun 1913, volume 67 dengan judul “Inscriptie van Kota Kapoer” (Coedès 1918: 1).

Setahun setelah terbitnya artikel Coedès tersebut, Willemine Fruin-Mees menerbitkan sebuah buku berjudul *Geschiedenis van Java* (Sejarah Jawa). Buku ini merupakan rangkuman dari sejumlah penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Jan Laurens Andries Brandes di akhir abad ke-19 sampai dengan tulisan Nicolaas Johannes Krom di awal abad ke-20 tentang masa lalu Jawa, diterbitkan oleh Commissie Voor De Volkslectuur, yang selanjutnya disebut Balai Pustaka, sebuah lembaga yang mengurus bacaan-bacaan yang pantas untuk disebarakan bagi masyarakat Hindia.³ Dalam kata pengantarnya, Hossein Djajadiningrat, seorang sarjana Indonesia pertama di bidang sejarah dengan karyanya yang cukup terkenal *Tinjauan Kritis Sejarah Banten*, mengatakan bahwa karya Fruin-Mees ini merupakan bentuk ringkas dari sejarah Jawa yang ditulis secara populer, dan tidak hanya membahas sejarah dinasti, tapi juga kebudayaan secara umum. Karyanya adalah sebuah sintesis dari tulisan-tulisan yang ditulis secara akademik

³ Untuk informasi lebih jauh terkait Balai Pustaka, lihat (Jedamski 1992)

oleh sarjana seperti Brandes dan Veth (Djajadiningrat dalam Fruin-Mees 1919). Hal ini kemudian ditegaskan oleh sang penulis buku yang mengatakan bahwa apa yang ia lakukan lebih merupakan sebuah rangkuman dari sejumlah karya yang pernah terbit, dan karenanya tidak akan ada temuan-temuan baru di dalamnya. Memang tujuan penerbitan ini sendiri lebih merupakan upaya untuk memopulerkan masa lalu Jawa bagi penduduknya, sebuah upaya yang dinilai cukup berhasil. Sebab, setelah penerbitan ini, pengetahuan tentang Majapahit – sebuah kerajaan di Jawa yang kekuasaannya cukup luas – menjadi cukup populer (Reid 1979: 288). Demikian, seperti Sumatra, Jawa juga pernah mengalami masa yang gemilang. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit menjadi simbol kejayaan sekaligus simbol kesatuan yang memiliki akar sejarah di masa lalu.

Pengetahuan tentang masa lalu Sriwijaya dan Majapahit muncul, pada dasawarsa kedua abad ke-20, ketika semangat kebangsaan masih didasarkan pada kesamaan etnis. Budi Utomo, yang lahir pada tahun 1908, misalnya, memiliki tujuan untuk menghidupkan kembali kebudayaan Jawa. Generasi mudanya di tahun 1917, di bawah kepemimpinan Soeriokoesomeo, mempromosikan apa yang disebut sebagai nasionalisme Jawa. Ia tidak ingin semua suku-bangsa bersatu, sebab pengorbanan untuk mewujudkannya terlalu mahal (Reid 1979: 282–83). Sebagai reaksi atas keberadaan Nasionalisme Jawa, sekelompok pemuda Sumatra (terutama mereka yang berasal dari Minangkabau), pada tahun 1919 membentuk Jong Sumatranen Bond (JSB), yang diinisiasi oleh para pelajar di STOVIA. Seperti halnya, nasionalisme Jawa, mereka juga bertujuan memperjuangkan kejayaan Sumatra sebab hanya dengan persatuanlah orang Sumatra bisa kembali berjaya (Reid 1979: 286–87).

Penemuan Sriwijaya dan popularisasi kejayaan Majapahit di masa lalu kemudian menjadi dasar historis persatuan seluruh etnis di Nusantara. Nasionalisme etnis yang awalnya diperjuangkan, tidak lagi mendapat tempat, digantikan oleh kesatuan nasional, dengan contoh dua kerajaan tadi. Ide tentang kegemilangan masa lalu ini kemudian terus direproduksi dalam bentuk populer seperti karya sastra. Sanusi Pané dan Muhammad Yamin adalah dua orang penulis yang paling giat mempromosikan hal ini. Pada tahun 1928, Sanusi Pané menerbitkan *Air Langga* (dalam bahasa Belanda), sebuah naskah drama yang didasarkan pada Raja Jawa yang cukup terkenal pada abad ke-11. Di tahun yang sama, Muhammad Yamin, menampilkan drama berjudul *Ken Angrok dan Ken Dedes* pada acara Kongres Pemuda. Naskah ini, didasarkan atas pembacaan dua naskah kuno Jawa: *Negarakartagama* dan *Pararaton*. Beberapa tahun kemudian, Sanusi Pané menerbitkan karya lain berjudul *Kertadajaja* (1932) dan *Sandhyakala ning Madjapahit* (1933). Penulisan karya-karya ini, sebagaimana dikatakan Teeuw, didasarkan pada kajian yang dilakukan oleh para orientalis (Teeuw 1967: 27–28).

Tentu saja tidak semua orang bersepakat dengan ide tentang masa lalu yang seperti itu. Sukarno, misalnya – yang kerap memperjuangkan ide pentingnya masa lalu yang gemilang untuk meningkatkan nasionalisme, dalam pidatonya pembelaannya yang cukup terkenal di tahun 1930, *Indonesia Menggugat* – melihat Sriwijaya dan Majapahit sebagai imperialis yang tidak jauh berbeda dengan kaum imperial lain. Sementara itu, Sutan Takdir Alisjahbana, di tahun yang sama juga menulis bahwa semangat keindonesiaan merupakan sesuatu yang baru, tidak didasarkan pada masa lalu seperti Sriwijaya dan Majapahit (Supomo 1979: 183; lihat juga Teeuw 1967: 37). Meskipun demikian, gagasan mengenai kejayaan masa lalu di zaman Sriwijaya dan Majapahit tetap populer. Setelah kemerdekaan, kedua kerajaan yang dianggap sebagai asal usul persatuan Indonesia ini kerap ditampilkan dalam perdebatan terkait masa lalu Indonesia.

Penemuan kembali masa lalu Indonesia dengan adanya Majapahit dan Sriwijaya, dan popularisasinya dilakukan pada tahun 1920-an, bisa jadi tidak berkait secara langsung dengan disertasi yang ditulis oleh Van Leur di tahun 1934, dan juga tulisan-tulisannya tentang studi sejarah Indonesia di akhir tahun 1930-an. Sekalipun begitu, kedua peristiwa yang tidak bertaut ini kemudian menjadi inspirasi dan sumber perdebatan di tahun 1950 dan paruh pertama tahun 1960-an, tentang bagaimana sejarah Indonesia ditulis.

Masa lalu yang gemilang dan kritik sejarah Indonesiasentris

Gertrude Johannes Resink, seorang ahli hukum yang kemudian membaca sejarah Indonesia dengan kerangka hukum internasional, menemukan bahwa Indonesia tidak dijajah selama 350 tahun. Pernyataan ini tentu saja bertentangan dengan apa yang diyakini pada masa itu oleh para politisi. Tapi justru di situlah persoalannya; perbedaan titik berangkat, antara kerangka hukum internasional dan retorika para politisi, membuat perdebatan terjadi.

Pada 1950, Resink menulis sebuah artikel berjudul “lets over europacentrische, regiocentrische en indocentrische” (Sesuatu tentang Eropasentris, Regionalsentris, dan Indosentris) dalam jurnal *Oriëntatie*. Tulisan ini merupakan dasar dari apa yang kemudian dinamai sebagai “Perspektif Indonesiasentris”. Gagasan “Indonesiasentris” yang disampaikan di dalam tulisan ini bukan asli berasal dari dirinya. Ia mendapat istilah itu dari tulisan Gottfried . Wilhem Locher, seorang Guru Besar Antropologi, dalam tulisannya yang berjudul “Inleidende beschouwingen over de ontmoeting van Oost en West in Indonesië” (Pengantar pertimbangan atas pertemuan. Di dalam artikel tersebut, sebagaimana ditulis Resink, Locher membahas perbedaan antara perspektif Eropasentris dan Indonesiasentris dalam penulisan sejarah Indonesia. Hanya saja menurutnya, Locher tidak membahas lebih jauh apa yang dimaksud dengan hal tersebut. Karena itulah, ia bermaksud menuntaskannya (Resink, 2012: 1).⁴

Pertama, perspektif Eropasentris adalah praktik melihat Indonesia dari pendapat orang-orang Eropa, dan Belandasentris adalah pengkhususan dari itu. Contoh dari ini adalah *Koloniale Geschiedenis* karya Colenbrander dan *Geschiedenis van Nederlansch Indië* karya Stapel. Kedua, regiosentris adalah praktik melihat realitas dari sudut pandang etnis tertentu, dan Javasantris adalah yang paling dominan di antaranya. Contoh dari praktik pengoperasian perspektif ini adalah kajian yang dilakukan oleh para sarjana seperti Krom dan Stutterheim yang banyak melakukan studi terkait kebudayaan lokal yang didasarkan atas pembacaan historiografi lokal (hlm. 5). Sementara itu, seiring dengan terbentuknya kaum elite intelektual Indonesia, perspektif itu kemudian bergeser menjadi Indonesiasentris, yang salah satu tujuannya adalah untuk melawan perspektif regiosentris (hlm. 3). Bentuk dari itu adalah praktik penulisan yang ditawarkan oleh Van Leur. Menurut Resink, kemunculan yang terakhir ini telah memungkinkan terjadi perubahan perspektif dari regiosentris menjadi Indonesiasentris. Perspektif ini “bersumber dari sebuah kerangka acuan eropasentris dan diekspresikan menggunakan istilah ilmiah Belanda”, tulisnya. Karena itulah “Hal ini membuatnya jauh lebih tidak ekstrem dan berlawanan dengan perspektif Eropasentris daripada yang kadang kala dinyatakan atau disadari”, jelasnya lagi (hlm. 6). Demikian, artikel ini menandai kemunculan secara konseptual apa yang dinamai sebagai “perspektif Indonesiasentris”, yang istilahnya berasal dari Locher, sedang kerangka pemikirannya dari Van Leur.

⁴ Semua kutipan Resink merujuk ke buku *Bukan 350 Tahun Dijajah*, Depok: Komunitas Bambu, 2012.

Gagasan Resink terkait penulisan sejarah Indonesiasentris diartikulasikan dengan lebih jelas dalam artikelnya yang terbit dua tahun kemudian, *Tussen de mythen: Van koloniale naar nationale geschiedschrijving* (Di antara mitos: Dari kolonial menuju historiografi nasional). Sebagaimana jelas tampak dalam judul, tulisan ini berusaha mengelaborasi pergeseran paradigma dalam penulisan sejarah Indonesia yang mengalami masa kolonial dan sekarang sedang memasuki periode kemerdekaan dengan karakteristik penulisan sejarah nasional. Lagi-lagi tulisan Stapel menjadi sasaran kritik, dan tulisan Van Leur dijadikan landasan untuk melakukan kritik. Selain itu, ia juga menyebutkan karya Vlekke – *Nusantara: a history of Indonesia* – yang menurutnya, menawarkan perspektif yang sedikit lebih netral: tidak terlalu memihak orang Belanda, tetapi juga tidak memihak Indonesia (Resink 2012: 14).

Pada bagian historiografi nasional, ia menyebut beberapa nama seperti Pringgodigo, Yamin, dan Armijn Pané. Untuk yang terakhir, Resink malah memberi ulasan yang agak panjang, untuk menunjukkan model penulisan sejarah yang mengoperasikan perspektif Indonesiasentris. Dalam artikelnya yang berjudul “Indonesia di Asia Selatan”, menurut Resink, Armijn Pané berusaha menampilkan garis besar sejarah Indonesia sampai abad ke-16 dengan tidak hanya menempatkan Indonesia sebagai pusat, tapi juga meletakkannya sebagai bagian dari Asia Selatan, dan terutama bagian dari Asia Tenggara. Dengan kata lain, Armijn Pané sedang mengampanyekan model penulisan sejarah Indonesia yang lebih terbuka (hlm. 15).

Resink memberi penekanan pada bagian tersebut sebagai kritik terhadap kecenderungan dalam penulisan sejarah Indonesia yang didominasi oleh keberadaan mitos Nusantara, yakni mitos Sriwijaya dan mitos Majapahit. Selain itu, mitos terkait lama penjajahan di Indonesia juga kerap muncul. Dengan melakukan kritik, Resink ingin “agar historiografi Indonesia tidak hanya memunculkan gambaran yang terlalu fantastis dan berkembang menjadi disiplin ilmu yang tidak hanya diterima secara nasional, tetapi juga internasional” (hlm. 18). Hal ini hanya mungkin dilakukan dengan melakukan penelitian secara terperinci dan memperketat setiap pernyataan dengan pembuktian empiris. Penekanan terhadap pentingnya meletakkan historiografi Indonesia dalam kerangka global dilakukan, sebab ia khawatir bahwa historiografi nasional akhirnya hanya menggantikan sejarah nasional dari segi bentuk dan isi, sesuatu yang memang cukup lumrah terjadi.

Pada 1948, misalnya, Muhammad Yamin – seorang politisi yang dipercaya sebagai orang pertama yang sukses menyatukan Nusantara – menerbitkan *Gajah Mada*. Di dalam karya ini, Muhammad Yamin juga memberi gambaran kegemilangan Majapahit yang dicapai berkat sang Mahapatih Gajah Mada. Hal serupa juga bisa ditemui dalam buku Sanusi Pané, *Sedjarah Indonesia*, yang terbit pertama kali pada tahun 1943 ketika Pemerintah Militer Jepang sedang melakukan propaganda untuk menjauhkan segala sesuatu yang berunsur Belanda, termasuk karya sejarah. Di dalam karya ini, sang penulis mengatakan bahwa masa kejayaan Majapahit pada saat Rajasanegara berkuasa dan Gajah Mada menjadi patih, sebanding dengan masa ketika Eropa sedang melepaskan diri dari belenggu feodalisme. Pada saat itu, kota-kota terbentuk dan perdagangan berkembang maju (Oetomo 1961: 76–77).

Sepuluh tahun setelah penerbitan *Gajah Mada*, Muhammad Yamin juga menerbitkan sebuah buku berjudul *6000 tahun Mérah-Putih*. Ini adalah upayanya untuk melakukan penyelidikan tentang sejarah warna bendera nasional Indonesia. Buku ini diluncurkan bertepatan dengan perayaan ulang tahun ketiga puluh Sumpah Pemuda. Pada saat itulah bendera dua warna, merah dan putih, mulai dikibarkan sebagai simbol nasionalisme

Indonesia. (Yamin 1958a: 10–11; lihat juga Klooster 1985: 90). Karena warna merah dan putih itu sudah dijadikan simbol negara, simbol perjuangan bangsa Indonesia, maka kelahiran dua warna itu dalam kebudayaan Indonesia menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diselidiki. Tujuannya, tentu saja, supaya masyarakat Indonesia mengerti asal usul penggunaan dua warna itu dari masa ke masa.⁵

Pada tahun yang sama, Soetjipto Wirjosuparto (1915-1971), seorang pengajar di bidang ilmu purbakala dan sejarah kebudayaan di Universitas Indonesia, menerbitkan *Dari lima zaman pendjadjahan menudju zaman kemerdekaan*, dimaksudkan sebagai bahan pelajaran untuk tingkat SMA bagian A, B dan C. Sekalipun buku yang ditulisnya ini tidak didasarkan pada sebuah penelitian empiris, karya yang ditulisnya ini menawarkan cara memandang masa lalu Indonesia dengan cukup menarik. Perspektif yang ditawarkan olehnya sangat bertolak belakang dengan apa yang digagas oleh Resink. Ia mengatakan bahwa bukunya tersebut “disusun sedemikian rupa, sehingga tiap-tiap pertentangan yang telah terjdjadi antara bangsa Indonesia dan kekuasaan imperialis, chususnya pemerintah Belanda selalu dikupas dengan tajam”. Selain itu, “dalam buku ini”, ia melanjutkan “sedapat mungkin segala peristiwa yang terjdjadi di Indonesia ditilik dari tjita-tjita kesatuan Indonesia atau kesatuan dari sebagian Indonesia” (Wirjosuparto 1958: 4). Dengan mengatakan hal tersebut, Sutjipto Wirjosuparto mencoba membuat penafsiran akan masa lalu Indonesia sebagai sebuah proses yang linear menuju kesatuan Indonesia kontemporer, sebuah pernyataan yang menyiratkan bahwa prakonsepsi gagasan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa memiliki akar yang cukup dalam di masa lalu. Kesatuan Indonesia yang dibayangkan telah ada di masa lalu itu kemudian dihancurkan oleh kedatangan Belanda. Itulah sebabnya sejarah Indonesia dimaknai sebagai perjuangan untuk mengembalikan kesatuan Indonesia. Dalam kerangka inilah, pendapat yang mengatakan bahwa Belanda baru menjajah Indonesia pada dasawarsa kedua abad ke-20 – sebagaimana disampaikan Resink – dianggap sebagai upaya untuk mengurangi tanggung jawab Belanda sebagai penjajah (Wirjosuparto 1962: 15).

Apa yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, Sanusi Pané dan Sutjipto Wirjosuparto adalah sebuah upaya untuk menafsir masa lalu Indonesia dengan menunjukkan bahwa kejayaan Indonesia memiliki akar di masa lalu. Model penafsiran seperti ini bukan satu-satunya, tentu saja. Beberapa upaya lain juga dilakukan untuk memberi perspektif yang berbeda.

Perjuangan melawan feodalisme, perjuangan melawan penindasan

Pemberian landasan historis bagi negara yang baru lahir tidak selalu dilakukan dengan memberi akar historis sebuah persatuan yang dianggap pernah terjadi di masa lalu. Cara kerja seperti itu kerap dinamai sebagai sebuah pandangan sejarah yang romantik, dan cara pandang seperti ini lazim terjadi pada saat sebuah negara baru lahir.⁶ Meskipun

⁵ Harus diakui bahwa *6000 Tahun Sang Mérah-Putih* adalah sebuah penelitian ekstensif yang dilakukan oleh penulisnya. Ia mencoba mengombinasikan berbagai disiplin ilmu seperti arkeologi, antropologi, dan filologi dalam sebuah penelitian. Dari daftar karya yang dirujuk oleh Muhammad Yamin juga tampak dengan jelas bagaimana ia mengelola proyek penelitian yang cukup ambisius ini. Meskipun demikian, karena kekurangan data empiris untuk menopang pendapatnya tentang sejarah warna merah dan putih yang menjadi simbol bangsa ini sejak zaman prasejarah, karya Yamin ini lebih merupakan sebuah hipotesis. Penelitian lanjutan pun menjadi sesuatu yang penting dilakukan (Yamin 1958a, 90–91). Hanya saja gagasannya tidak menarik sejarawan-sejarawan yang lebih muda, yang lebih sering mengelompokkan pendapat Yamin sebagai sejarawan ideologis.

⁶ Dalam kaitan dengan hal ini, Prancis adalah contoh yang cukup menarik. Periode setelah Revolusi tahun 1789, terutama di awal abad ke-19, pergulatan merumuskan masa lalu nasional sebagai landasan historis keberadaan

demikian, ada juga pandangan lain yang melihat masa lalu sebagai sebuah alat untuk mengkritik masa kini. Biasanya hal itu dilakukan dengan melihat persoalan-persoalan masa kini dan mengaitkan asal usulnya di masa lalu, sebuah kerangka kerja yang membuat disiplin sejarah menjadi lebih fungsional. Setidaknya percobaan-percobaan itulah yang tampak dalam tulisan Mohamad Ali, Dipa Nusantara Aidit, dan Pramoedya Ananta Toer.

Pada tahun 1953, Mohamad Ali menerbitkan sebuah buku berjudul *Perjuangan Feodal*. Tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk memberikan gambaran umum Sejarah Bangsa Indonesia, dengan memberi penekanan bahwa “Bangsa kita adalah bangsa yang selalu hidup dalam suasana perjuangan [...] Memahami perjuangan Bangsa sendiri, menjadikan diri tentang pasang-surut perkembangan perjuangan di Indonesia adalah tujuan kitab yang serba sederhana ini”. Mohammad Ali juga menambahkan bahwa penamaan “Perjuangan Feodal” sebagai judul, menurutnya “karena inti-sari perjuangan pada masa itu ialah perkembangan semangat-feodal” (Ali 1963c: 3). Dari pernyataan sang penulis, jelas terlihat apa yang menjadi pokok persoalan karyanya itu.

Mohammad Ali sendiri merasa perlu untuk memfokuskan uraiannya terkait hal ini karena ia melihat bahwa cara pandang feodal masih cukup lazim diyakini. Ia menyaksikan betapa rakyat masih percaya bahwa kaum ningrat berhak untuk menguasai mereka, dan sebaliknya kaum ningrat pun meyakini bahwa rakyat harus tunduk kepada mereka. Demikian, menurutnya, “selama rakyat masih pertjaja, ningrat dapat bertachta diatas tachtanja! Selama rakyat masih mau, masih sanggup menjadi ABDI barang tentu ningrat masih dapat bersemajam diatasnja”. Ia juga meyakini bahwa “selama jiwa feodal masih menguasai kita Bangsa kita tidak dapat menjadi bangsa yang benar2 merdeka! Jiwa-feodal adalah jiwa terikat, jiwa yang terbatas, terkurung dalam lubuk-takut-chawahir....” (Ali 1963c: 4).

Ada dua langkah yang dilakukan oleh Mohamad Ali untuk memformulasikan gagasannya tersebut ke dalam uraian. Pertama, Mohamad Ali memberi tinjauan sepintas terkait perjuangan yang dilakukan oleh para pemimpin feodal yang berjuang dengan semangat feodal, dan karenanya keikutsertaan masyarakat di dalamnya lebih karena adanya kepercayaan akan kesaktian seorang pemimpin. Tujuan perjuangan itu sendiri tidak jelas, tapi tetap saja para pemimpin itu diikuti atas dasar kepemilikan kesaktian sang pemimpin. Itulah sebabnya kerelaan memberontak dan berjuang dari rakyat kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi sang pemimpin. Akibatnya, setelah tujuan tercapai, “gelanggang perjoangan ditinggalkan dan rakyat-djembel diserahkan kepada pendjadjah!” (Ali 1963c: 4). Demikian dalam *Perjuangan-Feodal*, pembaca disuguhi oleh perjuangan para tokoh seperti Purnawarman, Kertanegara, Sultan Agung, Iskandar Muda, misalnya, yang dikelompokkan sebagai, pemimpin feodal.

Kedua, dengan menunjukkan perjuangan para pemimpin feodal, Mohammad Ali juga bermaksud memaparkan betapa perjuangan rakyat selalu bergantung kepada seorang pemimpin. Pada zaman feodal, seorang ningrat memang sering kali memenuhi tugas sebagai pemimpin. Seorang pemimpin feodal, sudah jelas hanya memperjuangkan apa yang menjadi kepentingannya saja. Itulah kenapa, menurutnya, tugas kepemimpinan itu harus ada di tangan rakyat sendiri. “Bila rakyat masih bersifat feodal, barang tentu tugas dan hak rakyat djatuh ditangan kaum-feodal! Artinja: kita mundur....”, tulisnya (Ali 1963c: 4).

Uraian tentang pemimpin feodal ini berakhir pada kisah Mangkubumi dan Mas Said di pertengahan abad ke-18. Pemberontakan kedua tokoh ini jejaknya bisa dilihat dalam Perjanjian Gianti tahun 1755 yang membuat Kerajaan Mataram dipecah menjadi dua. Terkait peristiwa ini Mohammad Ali berkomentar: “Pemberontakan jang mula2 memberi harapan jang besar bagi rakjat djelata, bahwa Belanda segera dihanjutkan dari Mataram, berachir dengan pemetjahan dan kelemahan jang melebihi keadaan jang sudah2. Bila ditinjau lebih dalam, maka kekuasaan Belanda selandjutnja dan djuga kedudukan Belanda selandjutnja didasarkan atas perpetjahan jang ditimbulkan itu” (Ali 1963c: 195). Tentu saja, sebagaimana dikatakan oleh sang penulis, kisah perjuangan feodal sesungguhnya tidak berakhir di sana. Ia berpendapat bahwa: “Djiwa kefeodalan laksana suatu dasamuka mati dalam satu bentuk, hidup kembali dalam bentuk lain dengan irama gaja jang sukar diikuti. Maka perdjoangan melawan feodalisme-murni dan melawan feodalisme jang sudah berpadu dengan kolonialisme-imperialisme adalah salah satu daripada tudjuan Revolusi Indonesia jang multi-kompleks” (Ali 1963c: 200). Di sini Mohammad Ali kembali memberi penegasan akan apa yang menjadi tujuan utama merekonstruksi masa lalu Indonesia: memberi dasar historis dan teoretis untuk menyelesaikan Revolusi Indonesia.

Uraian tentang feodalisme ini bukan tanpa kritik. Dalam artikelnya yang berjudul “Penulisan Kembali Sedjarah Indonesia”, terbit tahun 1964, Sutjipto Wirjosuparto berpendapat bahwa Mohamad Ali telah membuat tafsir yang tidak sesuai dengan alam pikiran masyarakat tempat sumber-sumber itu ditulis, tapi malah melakukan kritik berdasarkan pemikiran Marxisme. Dengan kerangka itu, Mohamad Ali selalu melihat adanya pertentangan antara kaum feodal Indonesia dan rakyat Indonesia yang selalu ditindas. Menurut Sutjipto, penulis *Perjuangan Feodal* tidak mengerti alam pikiran rakyat Indonesia, sebab mereka tidak dipaksa oleh kaum feodal, tapi bekerja secara sukarela, seperti dalam pembangunan Borobudur yang didorong oleh semangat agama Budha (Wirjosuparto 1964: 33–35).

Meskipun demikian, model penafsiran serupa juga dilakukan oleh Dipa Nusantara Aidit. Melalui karyanya yang berjudul *Masjarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia*, yang terbit tahun 1957, ia berusaha memberi penafsiran atas sejarah Indonesia dengan kerangka Marxisme. Mohamad Ali sendiri, terkait buku karya Aidit, berkomentar bahwa “dalam bentuk singkat dan tegas dibentangkan Sedjarah Indonesia atas dasar2 Marxisme (sebetulnya lebih tepat Marxisme-Leninisme) setjara sistematis-metodis-didaktis” (Ali 1963a: 340).

Pada dasarnya penyusunan buku karya Aidit “dimaksudkan sebagai buku peladjaran untuk Sekolah2 Partai di pusat dan di provinsi2, dan disahkan oleh Sidang Pleno CC didalam Resolusi Mengenai Tulisan Tentang ‘Soal2 Pokok Revolusi Indonesia’”. Meskipun demikian, Departemen Agitasi dan Propaganda (Depagitrop) CC PKI yang menjadi sponsor utama berharap bahwa pembaca buku ini bukan hanya panduan bagi kader-kader revolusioner, tapi juga bagi perkembangan gerakan revolusioner itu sendiri (Aidit 1964: 3). Penegasan yang lebih konkret disampaikan juga oleh Depagitrop dalam pengantarnya untuk cetakan ke-5 yang diterbitkan tahun 1962, yaitu

“Dalam mempeladjar buku ini, patut mendjadi perhatian bahwa berkat perdjuangan Rakjat Indonesia jang berhasil diberbagai bidang dalam melawan kekuatan imperialis dan feodal, maka disana-sini terdapat fakta2 tentang djumlah penduduk, tentang perusahaan kapital monopoli asing, tentang perdjuangan kaum tani berhubung dengan adanja undang2 bagi hasil dan undang2 pokok

agraria, tentang perjuangannya pembebasan Irian Barat dan beberapa fakta-lainnya” (Aidit 1964: 4).

Pernyataan tersebut jelas bermaksud meletakkan buku ini dalam konteks perkembangan politik kontemporer Indonesia yang sedang berhadapan kembali dengan ancaman imperialisme dan feodalisme. Gagasan ini tentu saja mengingatkan pada bagian terakhir dari uraian Mohamad Ali yang mengatakan bahwa yang perlu diwaspadai dari feodalisme adalah ketika ia berkolaborasi dengan imperialisme.⁷

Penyusunan tulisan Aidit yang sangat ringkas dan kritis itu tidak didasarkan pada penelitian empiris yang ekstensif.⁸ Meskipun demikian, caranya melihat masa lalu cukup penting untuk memperkaya perdebatan tentang bagaimana masa lalu dan masa kini Indonesia diperdebatkan.

Cara melihat masa lalu dengan kerangka pemikiran konseptual yang jelas sebagai sebuah kritik terhadap masa kini, yang didasarkan pada penelitian sejarah Indonesia, bisa dilihat dalam tulisan Pramoedya Ananta Toer. Sebetulnya penulis ini lebih dikenal sebagai seorang sastrawan. Ia menulis sejumlah cerita pendek dan novel. Pada akhir tahun 1950-an, ketertarikan terhadap sejarah mulai muncul. Sayangnya ia tidak dikenal sebagai seorang penulis sejarah, dan tafsirnya atas masa lalu Indonesia sangat penting dan menarik untuk didiskusikan. Pada tahun 1964, Pramoedya menulis sebuah buku berjudul *Sedjarah Indonesia Modern*, jilid I. Ini bukan buku nonfiksi pertamanya, tentu saja. Sebelum itu, ia sudah menerbitkan *Panggil Aku Kartini Saja* (1962) dan *Hoa Kiau di Indonesia* (1960). *Sedjarah Modern Indonesia* juga sebetulnya adalah sebuah diktat yang ia tulis sebagai bahan kuliah di Universitas Res Publica.⁹

Pramoedya memulai uraiannya dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sejarah. Pembahasan mengenai hal ini dianggap cukup penting sebab, sebagai sebuah bahan ajar, tentu saja ia perlu memberi penjelasan terlebih dahulu persoalan dasar dari subjek yang akan dibahasnya. Menurutnya “sedjarah adalah garis besar perjuangan hidup nasion, bangsa, golongan ataupun individu dalam meningkatkan dirinya” (Toer 1964: II). Dari pernyataan tersebut ada dua hal yang menjadi pokok. Pertama, adanya subjek yang bisa terdiri dari individu maupun kelompok seperti sebuah bangsa misalnya. Kedua, cerita tentang individu atau kelompok itu berpusat sekitar perjuangannya dalam meningkatkan kualitas mereka. Itulah kenapa, menurut Pramoedya

sedjarah tidak boleh diartikan sebagai rangka kejadian2 ditambah dengan tafsiran, analisa dan kesimpulan sadja, tetapi terutama sekali mengedepankan pergulatannya jang fundamental, baik dalam mengalahkan kesulitan atau musuh pokok maupun jang tidak pokok atau sampingan, sehingga sedjarah lebih tepat dikatakan terdiri dari rangkaian peristiwa2 sedjarah. Djelasnja bahwa sedjarah tidak harus disusun menurut kedjadian2, tetapi terutama sekali pada sebab2

⁷ Ruth T. McVey mengulas dengan sangat baik buku Aidit ini dalam artikelnya yang berjudul “The Enchantment of the Revolution: History and Action in an Indonesian Communist Text”. Menurut McVey, *Indonesian Society and the Indonesian Revolution* bertujuan untuk menyediakan mitos terkait asal usul Indonesia yang pada akhirnya akan mengantarkan kepada pentingnya peranan PKI di dalamnya. Lihat (McVey 1979)

⁸ Denys Lombard mengatakan bahwa, dibandingkan dengan *Madilog* karya Tan Malaka, tulisan Aidit ini lebih memiliki rujukan peristiwa-peristiwa historis yang terjadi dalam sejarah Indonesia, sesuatu yang tidak ditemukan dalam tulisan Tan Malaka. Itulah kenapa, Lombard mengatakan bahwa “buku itu lebih bercorak ‘sejarah’ karena sejumlah acuan tertentu diambil dari prasasti atau berbagai babad di Jawa” (Lombard 1996: 170)

⁹ Ulasan yang lebih menyeluruh terkait Pramoedya sebagai seorang sejarawan pernah ditulis oleh Hilmar Farid dalam artikelnya yang berjudul “Pramoedya dan Historiografi Indonesia”. Untuk uraian lebih jauh, lihat (Farid 2008).

terjadinja pergulatan, proses pergulatan, kemenangan atau kekalahannya, serta faktor2 jang memungkinkan kemenangan atau kekalahan itu, sedang kedjadian2 haruslah dinilai sebagai matarantai ketjil2 dari proses tsb. sebagai materi objektif (Toer 1964: II).

Untuk membuat gagasan ini menjadi lebih konkret, ia kemudian menerapkan kerangka analisisnya untuk membaca negara Indonesia yang baru lahir. Ia mengatakan bahwa Revolusi Indonesia sedang berjalan menuju Sosialisme, “suatu masarakat tanpa penindasan dan penghisapan oleh manusia atas manusia, bangsa atas bangsa, nasion atas nasion”. Sosialisme yang ia maksud juga adalah sosialisme ilmiah dan bukanlah sosialisme utopis. Artinya, sosialisme yang dimaksud adalah “titik berat daripadnja adalah proses atau perkembangan jang terus menerus dari pergulatan itu, tanpa achir apalagi kalau achir itu diwujutkan dalam tokoh2, sehingga mendjadi kultus individu, jang dalam sedjarah menurut pandangan-tradisional melahirkan mitos2, sedang lebih djauh lagi melahirkan dongengan2 kajangan, dan djuga legenda2” (Toer 1964: II). Dengan mengatakan itu, Pramoedya telah menempatkan posisinya yang jelas: bahwa karya sejarah tidak boleh menjadi sebuah mitos baru di zaman modern. Oleh karenanya, produksi pengetahuan sejarah nasional harus didasarkan pada penyelidikan ilmiah, berfokus pada pergulatan individu atau kelompok, dan dalam proses yang tidak pernah selesai.

Dengan kerangka berpikir yang seperti itu, maka karya sejarah Indonesia yang ditulis oleh Pramoedya adalah sejarah pergulatan individu atau sebuah kelompok menuju sebuah bangsa yang merdeka, tanpa penindasan. Hal ini bisa jelas dibaca dalam *Sedjarah Modern Indonesia*. Diktat ini terdiri dua bagian: pertama, periode sebelum kebangkitan nasional, yang dinamai sebagai “zaman gelap”; kedua, periode setelah kebangkitan nasional. Masing-masing bagian terdiri dari beberapa bab yang disusun secara tematis. Uraian tematis ini cukup menarik karena umumnya, jika melihat karya-karya yang terbit sezaman, karya sejarah lebih banyak disampaikan secara kronologis. Tapi hal ini bisa dipahami, sebagaimana disampaikan oleh Pramoedya, bahwa sejarah tidak selalu harus disusun berdasarkan urutan kejadian, tapi lebih ke pembahasan mengenai sebab-sebab terjadinya pergulatan. Penyusunan seperti ini juga menunjukkan bahwa, sekalipun Pramoedya dikenal sebagai orang LEKRA, ia tidak mengoperasikan model penulisan sejarah Marxis yang mengurai peristiwa berdasar tahapan perkembangan masyarakat (Lihat Farid 2008). Dalam bagian “zaman gelap”, Pramoedya berusaha untuk mengurai sebab-sebab terjadinya “zaman gelap” dan pergulatan-pergulatan yang ada di dalamnya.

Dua bagian ini merupakan sebuah kausalitas: kebangkitan nasional karena keberadaan masyarakat yang tertindas. Cita-cita kebangkitan nasional pun karenanya menghapuskan praktik penindasan di dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya itu hanya bisa dilakukan secara bersama-sama dan dengan pengorganisasian yang baik. Satu hal yang juga ditegaskan oleh Pramoedya, penindasan itu sendiri tidak selalu dilakukan oleh kaum penjajah Belanda, tapi juga dilakukan oleh kaum sebangsa yang bekerja sama dengan orang Belanda. Itulah mengapa perjuangan kebangsaan pun tidak berhenti di pengusiran kaum penjajah dari luar, tapi juga penindasan yang dilakukan oleh kaum sebangsa.

Mohamad Ali, D. N. Aidit, dan Pramoedya Ananta Toer mencoba menulis sejarah Indonesia sebagai landasan teoretis untuk mengkritik masyarakat kontemporer. Ketiganya memberi penegasan bahwa hakikat penjajahan itu adalah penindasan, yang tidak selalu dilakukan oleh bangsa asing; tidak ada pemujaan terhadap kegemilangan masa lalu, yang sebetulnya merupakan bentuk dari kejayaan para penguasa feodal.

Percobaan merumuskan masa lalu secara institusional

Melihat masa lalu secara romantik dan secara kritis adalah dua model penafsiran masa lalu. Kedua model penulisan ini menggunakan kerangka berpikir yang menempatkan Indonesia dan penduduk di dalamnya sebagai subjek. Artinya, gagasan Van Leur yang bisa jadi dibaca melalui Resink, secara langsung maupun tidak, ikut memengaruhi pemikiran mereka. Upaya yang lebih serius untuk membahas paradigma ini dilakukan dengan penyelenggaraan Seminar Sejarah tahun 1957, sebuah peristiwa yang kerap dijadikan patokan perkembangan historiografi Indonesia.

Dalam acara tersebut, untuk kali pertama para intelektual dari negeri yang baru merdeka ini berkumpul, membicarakan sesuatu yang sangat penting: rumusan tentang masa lalu kolektif. Inisiatif penyelenggaraan seminar ini disampaikan oleh Sarino Mangunpranoto – yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan – setelah penyelenggaraan Seminar Ilmu dan Kebudayaan pada bulan Juni tahun 1956. Usulan ini kemudian diteruskan oleh Profesor Dr. Prijana yang menggantikan Sarino Mangunpranoto sebagai menteri. Adapun untuk penyelenggaraan, pihak Kementerian mendelegasikannya kepada Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia (Sardjito 1976: 1).

Terkait alasan diselenggarakan seminar ini, Sardjito – menjabat sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada pada waktu itu – dalam sambutannya mengatakan bahwa “didalam pemitjaraan kita semula, dimana hadir antara lain djuga J.M. Sdr. Prof. Dr. Prijana diterangkan adanja kebutuhan jang besar akan buku Sedjarah Indonesia jang baik, jang dapat dipergunakan disekolah-disekolah rendah dan menengah, karena buku2 jang ada pada dewasa ini dianggap masih belum sesuai dengan djiwa nasional kita pada djaman sekarang ini” (Sardjito 1976: 2). Kesadaran akan pentingnya buku sejarah ini juga lahir dari keyakinan bahwa pengetahuan sejarah sangat penting bagi pertumbuhan jiwa, terutama jiwa para pemuda dari sebuah bangsa yang sedang membangun. “Oleh karena itu Seminar Sedjarah ini dimaksudkan sebagai langkah pertama untuk mendapatkan bahan-bahan guna sedjarah Indonesia baru, jang bertjorak Nasional dan jang setjara ilmiah dapat dipertanggung djawabkan” ungkapnya (Sardjito 1976: 3). Demikian, negara menempati posisi yang sentral dalam seminar tersebut, mengingat tujuan dari seminar itu sendiri adalah pembentukan apa yang dinamai sebagai Sejarah Nasional.

Setidaknya ada enam pokok soal yang dibahas dalam seminar tersebut: konsepsi filsafat sejarah nasional, periodisasi sejarah Indonesia, syarat-syarat penulisan sejarah Indonesia yang bercorak nasional, pelajaran sejarah kebangsaan di sekolah-sekolah, pendidikan ahli sejarah, dan, pemeliharaan dan penggunaan bahan-bahan sejarah. Di antara keenam pokok soal ini, pembahasan mengenai “konsepsi filsafat sejarah nasional” yang paling banyak didiskusikan oleh para sejarawan. Bisa dikatakan, bahkan, yang tersisa dari seminar ini adalah kenangan akan perdebatan antara Muhamad Yamin dengan Soedjatmoko. Tentu saja seminar sejarah bukan hanya arena perdebatan bagi kedua tokoh ini. Meskipun demikian, dalam kesempatan ini, saya juga akan memfokuskan pembahasan ke perdebatan dalam “konsepsi filsafat sejarah nasional” dengan melakukan pembacaan ulang terkait apa yang disampaikan oleh kedua tokoh ini dan kenapa keduanya menyampaikan hal tersebut. Hal ini penting dilakukan sebab pada tahun-tahun setelah seminar ini, perdebatan filosofis terkait bagaimana seharusnya sejarah nasional Indonesia ditulis itulah yang paling sering dibicarakan.

Pada seminar itu, apa yang menjadi pertentangan antara Muhammad Yamin dan Soedjamoko adalah terkait apa yang dimaksud dengan “Filsafat Sejarah Nasional”, tema

dari Prasaran ke-I tentang “Konsepsi filsafat sejarah nasional”. Muhammad Yamin, dalam pemaparannya, mengatakan bahwa filsafat sejarah nasional merupakan sesuatu yang sangat diperlukan untuk dijadikan dasar “supaja penulisan sedjarah Indonesia **mempunyai sendi jang berdasarkan aliran fikiran**¹⁰ untuk menyusun sedjarah Indonesia kembali, setelah kemerdekaan-nasional tertjapai” (Yamin 1958b: 16). Untuk menjelaskan apa yang menjadi pokok persoalan, ia membagi pemaparannya menjadi tiga bagian: apa itu filsafat sejarah, apa itu sejarah nasional, dan apa itu filsafat sejarah nasional. Pada bagian pertama, ia menyebut para pemikir sejarah dari Timur dan Barat seperti, Ibn Khaldun, Voltaire Giambatista Vico, G. W. F. Hegel, Karl Marx, Karl Jaspers, Arnold Toyenbee, dan Prapantja (hlm. 12). Sekalipun filsafat sejarah membahas sesuatu yang universal, sedangkan filsafat sejarah nasional membahas yang parsial, Yamin tidak melihat adanya kontradiksi di antara keduanya. Dalam pandangannya, filsafat sejarah – yang kemudian mengarah ke filsafat kesusilaan – bagi seorang penulis sejarah nasional adalah “hubungan antara iman dengan amal, jang menimbulkan sjarat2 kesusilaan sebagai pembatasan budi orang jang beradab, berbangsa dan bernegara” (hlm. 24). Pada bagian kedua, perkara sejarah nasional, ia mengatakan bahwa “sedjarah kebangsaan ialah sedjarah jang dibatasi ruangan djasmani dan rohani sesuatu bangsa”. Dengan pengertian ini, ketika membahas sejarah nasional Indonesia, maka ruang geopolitik Indonesialah yang menjadi batasan yang tujuannya adalah untuk mencapai, menyusun dan memelihara kemerdekaan. Terakhir, Muhammad Yamin dalam pidatonya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan filsafat sejarah nasional adalah suatu filsafat sejarah “jang mentjari kebenaran dengan menafsirkan synthesis kedjadian2 diperdjalanan sedjarah Indonesia dalam ruangan hidup ruhani dan djasmani Bangsa Indonesia” (hlm. 34).

Berbeda dengan Muhammad Yamin, Soedjatmoko, dalam pidatonya menggugat gagasan “filsafat sejarah nasional”. Ia yang datang menggantikan Muhamad Hatta, karena berhalangan hadir, mengatakan bahwa istilah filsafat sejarah dan nasional merupakan sesuatu yang kontradiktif, sebab yang satu mengandaikan universalitas, sedang yang lain partikularitas. Soedjatmoko membangun argumennya dengan mengemukakan terlebih dahulu kecenderungan ditinggalkannya konsepsi sejarah yang besar-besar yang turun dari filsafat sejarah spekulatif (seperti Spengler, Hegel, dan Marx), dengan munculnya para filsuf seperti Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger. Menurutnya “zaman sistim2 fislafat sedjarah jang besar2 ini sudah lampau dan tidak akan kembali”. Realitas sejarah, karenanya, tidak lagi terjelaskan melalui satu atau dua prinsip saja, “melainkan bahwa kenjataan itu hanja dapat ditangkap didalam penglihatan berbagai prinsip sekaligus”. Demikian, menurutnya, “kenjataan sedjarah mendjadi polynterpretable” (Soedjatmoko 1958b: 41). Atas dasar itu pulalah, ia menolak adanya “konsepsi filsafat sejarah nasional” dengan mengatakan bahwa “dengan mengadakan masalah suatu filsafah sedjarah nasional, sebenarnja kita telah meninggalkan bidang ilmu sedjarah sebagai ilmu, dan telah mengindjak suatu lapangan lain, jaitu lapangan **ideologi**, lapangan penggunaan sedjarah untuk keperluan politik jang achirnja bisa mendjurus kearah **demagogie**” (hlm. 44). Ini adalah keberatan utama Soedjatmoko yang beranggapan bahwa seorang sarjana itu bukan politikus dan demagog, melainkan seorang peneliti yang mendasarkan penelitiannya pada data empiris. Atas dasar itu pulalah ia menegaskan bahwa renungan tentang sejarah (filsafat sejarah) lahir setelah penyelidikan sejarah (hlm. 45). Dengan mengatakan itu, Soedjatmoko mengingatkan supaya sejarah sebagai sebuah ilmu tidak

¹⁰ Cetak tebal sesuai dengan teks asli

menjadi abdi suatu ideologi, dan sebaliknya harus terus memerangi mitos-mitos dalam sejarah yang kerap mendapat perlindungan dari kekuasaan politik (hlm. 49-50).

Setidaknya ada dua poin yang membuat Muhammad Yamin dan Soedjatmoko berbeda. Pertama, Yamin membangun pemikirannya dengan dasar para pemikir abad pencerahan yang percaya akan adanya kesatuan sistem dan gerak sejarah yang teleologis. Dalam kerangka ini, pikiran Yamin menjadi sangat optimis dalam melihat fungsi sejarah dalam proses pembentukan kesadaran kebangsaan. Sementara itu, Soedjatmoko lebih dipengaruhi oleh para filsuf yang pesimis melihat visi sejarah progresif akibat Perang Dunia II, dan karenanya ia tidak lagi percaya kepada universalitas. Kedua, hubungan antara teori dan praktik. Muhammad Yamin tidak memberi pemisahan antara keduanya, bahkan memberi penekanan akan pentingnya hubungan antara ilmu dan amal seperti dalam pernyataannya tentang filsafat kesusilaan yang harus menjadi suluh dalam penulisan sejarah nasional. Sementara itu Soedjatmoko memberi kesan memisahkan keduanya. Kebebasan dalam penyelidikan menjadi jargon Soedjatmoko. Karena hanya dengan cara itulah ilmu sejarah bisa bermanfaat untuk memperkaya kebudayaan kita, meluaskan kesadaran tentang diri kita, terus menerus membawa bahan baru yang akan menambah pemahaman kita mengenai waktu sekarang, sehingga juga menambah kesanggupan kita untuk menghadapi hari depan. Dengan begitu, kita tidak lagi perlu membicarakan pentingnya label nasional dan bukan nasional. Perdebatan harusnya berpusat apakah penyelidikan dilakukan secara bebas atau tidak.

Persoalan kebebasan yang ditawarkan oleh Soedjatmoko menjadi bermasalah ketika dihadapkan pada pertanyaan tentang komitmen sosial sejarah sebagai sebuah ilmu. Ini berkait erat dengan apa yang sebetulnya diperjuangkan dan kepada siapa sejarah sebagai sebuah ilmu harus berpihak. Tidak mungkin, dalam praktiknya, sejarah sebagai sebuah ilmu tidak memiliki keberpihakan. Soedjatmoko menyebut Van Leur, Berg, dan Resink sebagai sejarawan-sejarawan yang telah berhasil merobohkan mitos-mitos di dalam sejarah. Hal itu dilakukan oleh mereka melalui penyelidikan sejarah. Itulah kenapa, menurutnya, penelitian sejarah itu harus dilakukan secara bebas, jangan diikat oleh batasan-batasan kepentingan nasional. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apakah hasil-hasil dari para peneliti itu betul bebas nilai dan tidak ideologis? Apa betul para ilmuwan itu hanya berpihak kepada keilmuan tanpa ada visi politik di baliknya?

Setidaknya itulah yang disampaikan oleh Johannes Berthus Avé yang menanggapi pidato Soedjatmoko dalam acara tersebut (Avé 1958: 62–63). Terhadap kritik ini, Soedjatmoko mengatakan bahwa pangkal soalnya adalah kekacauan istilah filsafat sejarah nasional yang terdiri dari dua hal yang kontradiktif, yaitu filsafat sejarah (yang universal) dan sejarah nasional (yang terbatas). Ia keberatan dengan adanya istilah filsafat sejarah nasional, tapi tidak dengan sejarah nasional. Soal prakonsepsi dalam penelitian yang menjadi panduan seseorang dalam melakukan penulisan sejarah, ia tidak menyangkalnya. Tapi menurutnya, hal itu bukanlah wilayah filsafat sejarah, melainkan historiografi (Soedjatmoko 1958a: 82–83). Di sini, Soedjatmoko tampak ingin ketat dalam penggunaan kategori dan istilah. Terkait kerancuan istilah, Boejoeng Saleh mengatakan bahwa baiknya persoalan istilah ini tidak perlu dibuat rumit. Apa yang penting dalam seminar ini, menurutnya, adalah “mentjari, menindjau sedjarah sebagai sesuatu pengetahuan jang mengadjarkan kepada kita bagaimana kita perlu bertindak, bagaimana kita perlu berbuat” yang ditujukan untuk kepentingan nasional (Saleh 1958: 65). Ini bukan kali pertama Soedjatmoko dan Boejoeng Saleh terlibat dalam perdebatan. Menanggapi artikel yang ditulis oleh Soedjatmoko di majalah *Konfrontasi* No. 1 tahun 1954, berjudul “Mengapa ‘Konfrontasi?’”, terkait krisis, Boejoeng Saleh mengkritik

dengan keras bahwa apa yang dinamai krisis oleh sang penulis tidak didasarkan pada kenyataan empiris. Demikian, dengan ketatnya upaya penggunaan istilah oleh Soedjatmoko dan praktisnya cara berilmu Boejoeng Saleh, sepertinya kedua pemikir ini memiliki pijakan berfilsafat yang tidak sama: filsafat idealisme yang abstrak kontra filsafat materialisme yang konkret, antara pendukung humanisme universal dan realisme sosialis¹¹.

Perbedaan antara yang abstrak dan yang konkret ini juga bisa dilihat dari cara bagaimana Wiratmo Soekito mengomentari Seminar Sejarah tahun 1957 dalam karyanya *Renungan tentang sedjarah*, terbit tahun 1961.¹² Dalam karyanya ini, ia mengatakan bahwa apa yang didiskusikan dalam Seminar Sejarah merupakan sebuah pengingkaran terhadap universalisme sejarah. Menurutnya, upaya yang dilakukan untuk melakukan “nasionalisasi” ini tidak mungkin mewujudkan karena dua hal: adanya jerat teori moral modern dan lemahnya penguasaan terhadap asas filsafat sejarah. Lebih jauh ia mengatakan,

“Tertumbuknja kepada djeratan teori moral modern menimbulkan pikiran2 totalitair dibawah nama nasionalisme, sedang tidak dikuasainja azas fundamental dari falsafah sedjarah, menimbulkan pikiran2 tentang ‘Indonesia centris’, dll. Dengan pikiran2 ini akan timbul suatu bahaya anarki jang sama hebatnja dengan regionalisasi, maupun individualisasi sedjarah, jang akan melupakan kenjataan, bahwa manusia adalah suatu machluk bermasyarakat jang setjara memusat pada Wertperson bersama2 merealiseer nilai2 kemanusiaan [...] Dalam arti jang terachir, maka apakah jang hendak kami katakan dengan sedjarah tidaklah lain: realisasi bersama terhadap nilai2 didalam waktu” (Soekito 1961: 18–19).

Berbeda dari Wiratmo Soekito, Soetjipto Wirjosuparto berpendapat bahwa seminar tersebut malah kurang memperjuangkan kepentingan nasional, sekalipun berupaya membuat rumusan tentang apa yang dinamai sebagai sejarah nasional. Hal itu, menurutnya, “karena pada waktu tersebut Indonesia masih mentolerir alam pikiran liberal, dalam keputusan Seminar Sedjarah Nasional masih kelihatan adanja hal-hal jang kompromistis, artinja disamping berpangkal kepada filsafat negara Pantjasila masih diakui adanja pikiran tentang filsafat dari luar kebudayaan Indonesia”. Masih adanya kompromi dan kenyataan bahwa Pancasila masih kerap ditafsir secara liberal, kedua hal itu pulalah, menurutnya, yang menyebabkan “dasar filsafat sedjarah jang dihasilkan oleh Seminar Sedjarah Nasional Indonesia di Jogjakarta itu belum mendjadi pedoman jang kuat untuk penjelesaian Revolusi Indonesia” (Wirjosuparto 1965: 292).

Terkait seminar tahun 1957, Nugroho Notosusanto berpandangan bahwa apa yang diupayakan dalam forum tersebut adalah sebuah ikhtiar untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan “sejarah nasional” bukan dalam pemahaman yang chauvinistik, tapi lebih merupakan sejarah yang menjadikan komunitas nasional sebagai kerangka referensi. Kata “nasional” tidak saja dimaknai sebagai lawan dari “kolonial”, tapi juga kritik terhadap “regional” dan “provinsial”. Penulisan sejarah karenanya harus difokuskan kepada segala upaya perjuangan untuk kesatuan nasional, dengan dasar

¹¹ Polemik antara Soedjatmoko dengan Boejoeng Saleh ini sudah dibukukan. Lihat (Soedjatmoko and Saleh 2004). Ulasan terkait ini juga bisa dilihat dalam (Nursam 2002) halaman 97-117.

¹² Ini adalah sebuah refleksi tentang filsafat sejarah, yang menurut Mohamad Ali, membentangkan dan mengupas masalah-masalah sejarah secara umum dan beberapa persoalan sejarah Indonesia dengan menggunakan istilah-istilah filsafat fenomenologis, sehingga menjadi sukar dipahami (Ali 1963b: 154).

kepercayaan bahwa nasionalisme Indonesia merupakan sintesis dari semua grup etnis (Notosusanto 1965: 7).

Komentar terakhir ini lagi-lagi menunjukkan keragaman pendapat terkait bagaimana membuat rumusan sejarah nasional. Nugroho Notosusanto adalah seorang peneliti yang mendapat pendidikan di bidang sejarah. Tulisannya berasal dari makalah yang dipresentasikan di seminar tingkat sarjana di School of Oriental and African Studies, Universitas London. Pemaparan tersebut tentu saja mengandaikan para pendengar yang berasal dari berbagai latar belakang kebangsaan dan keilmuan yang berbeda-beda. Hal ini juga menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai historiografi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perdebatan yang muncul di tingkat global. Apa betul demikian?

Perdebatan di tingkat global: Asiasentris atau Eropasentris?

Dalam ulasannya tentang perkembangan historiografi Indonesia, Justus M. van der Kroef mengkritik pemikiran Resink sebagai terlalu menyederhanakan persoalan dan terlalu berlebihan dengan pernyataannya yang mengatakan bahwa Indonesia baru dijajah pada dasawarsa kedua abad ke-20 (Kroef 1958: 366). Dasar hukum internasional yang dipakainya untuk menunjukkan bahwa sejak kedatangan orang Eropa – terutama kedatangan Belanda di abad ke-17, masih banyak kerajaan merdeka yang berdiri – mengabaikan banyak aspek. Sebab, menganggap kontrak yang terjadi antara Belanda dan kerajaan-kerajaan merdeka itu sebagai dua pihak yang setara adalah penyangkalan atas realitas yang sesungguhnya terjadi (hlm. 367). Selain itu, Resink yang mengutip J. C. C. Haar dalam karyanya *Zelfbestuurpolitiek ten Opzichte van de Korte Verklaringlandschappen in Nederlandsch-Indië* (1939), terkait pandangan seorang juris yang menganggap orang Indonesia sebagai orang asing dan jika seorang penguasa Indonesia tidak menyerahkan kekuasaannya, maka akan dianggap sebagai orang asing, adalah sebuah kutipan yang sepotong, yang hanya dikutip untuk menopang teorinya saja (hlm. 369-370).¹³

Kritik yang disampaikan Van der Kroef ini memiliki dasar yang berbeda dari yang disampaikan Sutjipto Wirjosuparto. Tidak ada indikasi bahwa Sutjipto membaca artikel yang terbit pada tahun 1958 ini. Tapi kritik keduanya mirip: pernyataan Resink yang mengatakan bahwa penjajahan selama 350 tahun itu adalah mitos tidak bisa diterima.

Dengan menyampaikan kritik itu, tidak berarti bahwa Van der Kroef menyetujui pendapat yang mengatakan sebaliknya. Setidaknya pernyataan itu tidak ditemukan dalam tulisannya. Satu hal yang ingin ia sampaikan melalui kritik itu adalah kehati-hatian dalam penggunaan kerangka konseptual untuk membaca fakta sejarah. Hal ini perlu dilakukan sebab perdebatan yang juga sedang berlangsung pada periode itu adalah pertentangan antara perspektif Eropasentris dengan Asiasentris. Yang terakhir ini juga menjadi bahan perdebatan karena mayoritas negara-negara Asia pada waktu itu memiliki nasib yang sama, baru terbebas dari imperialisme barat dan sedang berusaha mendefinisikan identitas kebangsaannya melalui penelusuran sejarah.

Pada tanggal 14 Desember 1959, Profesor John Bastin menyampaikan kuliah umum berjudul “The Study of South East Asian History”. Ceramahnya menyentuh beberapa aspek terkait penulisan sejarah di Asia Tenggara yang bisa mengundang refleksi teoretis

¹³ Kutipan lengkapnya adalah: “in those cases in which the Gouvernement institutes a civil action against an Indonesian ruler who has not surrendered his powers, the only possible solution for our judges is that this ruler juridically regarded as a foreigner, in consequence of which he can, according to the cited article of the Regulation on Civil Procedure, be haled before the Netherlands-Indies judge, that is – in accord with the prescriptions of State Gazette 1876 No. 10 – in the first instance before the Bench of Justice” lihat (Kroef 1958, 369–70). Tulisan italic merupakan kalimat yang dihilangkan dalam kutipan Resink, dan penekanan dalam cetak miring itu terdapat dalam tulisan Van Der Kroef.

dari hal itu. Karena itulah sejumlah tanggapan kemudian muncul. Salah satu yang menimbulkan perdebatan adalah pernyataannya yang menggeneralisasi kecenderungan propagandis dari karya sejarah yang ditulis oleh orang Asia (Alatas 1964: 247).

Terkait hal ini Damodar Prasad Singhal menyampaikan keberatannya dalam sebuah artikel yang diterbitkan di *Southeast Asian History* tahun 1960. Singhal berpandangan bahwa seorang sejarawan yang mengesampingkan fakta dan bertindak lebih sebagai seorang propagandis, haruslah mendapat kritik tajam. Tapi, pertama-tama, kritik terhadap perilaku sejarawan yang demikian harus dibuktikan dengan data. Nah, inilah yang disesalkan dari tulisan Bastin. Sebab, ia tidak menyebut nama sejarawan Asia lain sebagai contoh dari sejarawan yang dikritiknya kecuali Kavalam Madhava Panikkar, penulis *Asia and Western Dominance*. Bahkan, walaupun Panikkar dianggap sebagai contoh sejarawan profesional, atas dasar apa ia bisa dianggap mewakili kecenderungan praktik penulisan sejarah di Asia, juga tidak bisa diterima (Singhal 1960: 119).

Sebetulnya, tanggapan yang lebih konseptual muncul dari John R. W. Smail. Dalam artikelnya yang terbit tahun 1961 berjudul “On the Possibility of an Autonomous History of Modern Southeast Asia”, ia mengelaborasi lebih jauh apa yang disebut sebagai perspektif Eropasentris dan Asiasentris beserta sejumlah persoalan yang muncul di dalamnya. Ia tidak menjadikan tulisan John Bastin sebagai sasaran kritik, tapi lebih menjadikannya sebagai pijakan awal untuk mengelaborasi persoalan yang cukup penting dalam praktik penulisan sejarah pada saat itu: pengoperasian sudut pandang. Sebagai seorang sarjana yang dasarnya adalah kajian Indonesia, ia menjadikan Indonesia sebagai kasus, untuk kemudian ditarik generalisasi supaya kesimpulannya bisa juga diterapkan di Asia Tenggara secara keseluruhan.

Pertanyaan utama dalam tulisannya, yang berangkat dari pidato John Bastin dua tahun sebelumnya, adalah seputar kemungkinan seorang Eropa menulis sejarah Asia. Pertanyaan ini diajukan karena adanya pendapat yang mengatakan bahwa orang Eropa tidak mungkin bisa melakukan itu, karena latar belakang budaya dan masa lalunya. Hal ini hanya akan membuat kajiannya menjadi bias (Smail 1961: 73). Dengan itu, sejarah Asia hanya mungkin ditulis oleh orang Asia. Tapi persoalan lain kemudian muncul, mengingat sejarawan Asia yang menulis itu adalah individu-individu yang dibesarkan dalam tradisi Barat. Jika demikian, maka sejarah asiasentris tidak bisa ditulis baik oleh orang Eropa maupun orang Asia, atau bisa dilakukan oleh keduanya (hlm. 75). Kerumitan itulah yang John Smail coba urai dalam artikel ini.

Ada dua hal yang mendapat penekanan lebih. Pertama, John Smail merumuskan Asiasentris dalam dua pemaknaan: perspektif dan penilaian moral. Perspektif menurutnya juga bisa dimaknai dengan dua cara, yakni terkait pengoperasian sudut pandang dan penilaian penting tidaknya suatu persoalan. Kedua hal ini bisa saling bertaut, artinya kita bisa menggunakan sudut pandang tertentu karena pengoperasiannya dianggap penting, dan begitu pula sebaliknya. Contoh: dalam peristiwa munculnya epidemi pes pada awal abad ke-20 di Jawa, kita bisa saja menggunakan sudut pandang para dokter Jawa, alih-alih para dokter Belanda, untuk penceritaan. Hasil yang diperoleh pun akan berbeda. Penggunaan sudut pandang itu dilakukan karena kita menganggap penting sudut para dokter Jawa ini dalam peristiwa epidemi pes. Sementara itu, terkait penilaian moral, ia menjelaskan bahwa penulisan sejarah selalu dikaitkan kebaikan dan kejahatan para tokoh. Artinya, dalam pengoperasian kerangka Asiasentris, penilaian moral, tentang baik dan jahat, mendapat porsi yang cukup besar dalam mengevaluasi peristiwa sejarah (hlm. 77-78). Kedua pemaknaan ini bisa dibaca pada mereka yang mengoperasikan kerangka Asiasentris;

sebagian memberi penekanan kepada yang pertama, sementara yang lain lebih suka memaknainya sebagai yang kedua.

Kedua hal ini kemudian mengantarkan pada apa yang menjadi pokok persoalan kedua: bentuk. Untuk persoalan bentuk, ia membuat tiga pengelompokan. Pertama, apa yang ia sebut sebagai moral netral + sudut pandang Asiasentris. Van Leur adalah contoh yang ia tunjukkan untuk model ini (hlm. 78). Kedua, moral netral + sudut pandang Eropasentris. Untuk bentuk ini, ia menunjukkan karya Vlekke – *Nusantara: a history of Indonesia* – sebagai contoh. Dalam karyanya ini, ia masih mencoba tidak memberi penilaian terhadap orang-orang pribumi yang melakukan pemberontakan, tapi sudut pandang penceritaan dan penting tidaknya suatu alur, masih ditentukan oleh orang-orang Belanda (hlm. 79). Ketiga, moral berpihak + sudut pandang campuran Eropasentris dan Asiasentris. Anwar Sanusi adalah contoh yang ditunjukkan dalam model penulisan ini. Kombinasi yang terdapat dalam bentuk ketiga ini cukup mengejutkan sebetulnya, sebab yang terjadi adalah model penulisan yang lebih mirip dengan retorika para politisi. Meskipun demikian, John Smail sendiri mengakui bahwa dalam kasus Indonesia hal itu dimungkinkan karena para penulis sejarahnya lebih sering menggunakan sumber-sumber sekunder dari tulisan orang-orang Belanda (hlm. 80-83).¹⁴

Dari dua pokok persoalan yang disampaikan oleh John Smail, persoalan Indonesiasentris yang menjadi bahan perdebatan di Indonesia harus selalu dibaca dalam kaitannya dengan dimensi global. Memang dalam artikel itu John Smail tidak berbicara tentang Indonesiasentris, tapi kerangka yang dipakai untuk membaca dan juga pokok persoalan yang ada di dalamnya juga merupakan persoalan yang sama yang terdapat dalam perdebatan di Indonesia: perspektif dan penilaian moral. Tapi apakah artikel ini menjadi bahan perdebatan di Indonesia?

Landasan teoretis untuk menuntaskan revolusi?

Tulisan John Smail yang sangat konseptual itu sepertinya kurang mendapat perhatian publik di Indonesia yang pada saat itu lebih banyak disibukkan dengan perdebatan tentang bagaimana menjadikan kajian sejarah lebih fungsional sebagai penopang revolusi. Di antara yang sedikit itu, Soedjatmoko termasuk yang membacanya. Setidaknya kesan itulah yang ia tampilkan dalam pendahuluan buku kumpulan tulisan yang berjudul *Introduction to Indonesian Historiography*. Buku ini terbit tahun 1965, tapi pengumpulan naskah dan penentuan kerangka sudah ditentukan sejak awal tahun 1960. Itulah kenapa, artikel John Smail yang terbit tahun 1961 tidak bisa dimasukkan ke dalam buku ini.

Jejak pembacaan Soedjatmoko tampak dalam pernyataannya bahwa persoalan Indonesiasentris bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Menurutnya, “Ini berlangsung dalam ruang lingkup yang lebih luas dalam pencarian sudut pandang yang Asia-sentris untuk sejarah Asia, yang berbeda dari sudut pandang yang Eropa-sentris yang selama ini mendominasi historiografi modern” (Soedjatmoko 1995a: xxvi).¹⁵ Dengan pernyataan

¹⁴ De Casparis dalam artikelnya menulis bahwa penulisan sejarah Indonesia pada masa ini terdiri dari dua bentuk: buku teks pelajaran sejarah untuk tingkat dasar dan menengah dan buku sejarah yang memiliki fungsi memperkuat perjuangan nasional. Untuk yang pertama ia menunjukkan *Sedjarah Indonesia* karya Sanusi Pané. Selain dia, ada juga Anwar Sanusi yang menulis *Sedjarah Indonesia untuk Sekolah Menengah*. Untuk yang kedua, De Casparis menunjukkan karya-karya karangan Muhammad Yamin seperti *Diponegoro*, *Gadjah Mada*, dan *6000 Tahun sang Mérah-Putih* sebagai contoh. Lihat (Casparis 1961, 148–49)

¹⁵ Kutipan-kutipan dari buku ini didasarkan pada terjemahan bahasa Indonesianya yang berjudul *Historiografi Indonesia Sebuah Pengantar*, terbit tahun 1995.

ini, ia berusaha membawa perdebatan melampaui batas-batas nasional, begitu pula dengan ajakannya dalam penulisan sejarah Indonesia.

Tapi bagaimanapun, paruh pertama tahun 1960-an adalah tahun ketika ilmu sejarah harus diarahkan untuk menopang kebijakan politik. Dengan ini, tidak berarti apa yang dinamakan penelitian ilmiah menjadi absen. Hanya saja praktik itu sering kali tercampur dengan jargon-jargon politik.

Pada 1960 *Penelitian Sedjarah* lahir, sebuah majalah ilmiah – demikian ia menyebut namanya sendiri – yang dikeluarkan oleh lembaga swasta Jajasan “Lembaga Ilmiah Indonesia Untuk Penjelidikan Sedjarah”. Iwa Kusuma Sumantri adalah ketua pengurus yayasan, dan sebagai anggota, ada nama-nama seperti P. A. Hoesein Djajadiningrat, R. M. Ng. Purbatjaraka, R. Soekanto, dan Adam Malik. Sementara itu, Presiden Sukarno merupakan Ketua Kehormatan yayasan ini. Dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah, *Penelitian Sedjarah* dengan tegas, sebagaimana tampak dalam sampulnya, mengatakan “mendukung sepenuhnya pelaksanaan Usdek dan Manifesto Politik”¹⁶.

Iwa Kusuma Sumantri, dalam kata pengantar nomor pertama majalah ini, mengatakan bahwa tinjauan sejarah untuk persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat merupakan sesuatu yang penting karena setiap peristiwa yang timbul di dalam masyarakat tidak bisa dilepaskan dari kerangka perjalanan sejarah nasional yang juga harus dibaca dalam kerangka sejarah umum. Dalam kaitan dengan hal ini, karya sejarah yang tidak ditulis secara objektif “dapat menjesatkan pandangan2 jang dibutuhkan untuk mengadakan penilaian keadaan sekarang dan keadaan jang akan datang, baik bagi umum maupun bagi para ahli jang bertugas merantjangkan, menetapkan dan melaksanakan kebidjaksanaan pemerintah dalam kepentingan rakjat dan negara”, tulisnya. Persoalannya, ia melanjutkan “sampai pada dewasa ini belumlah ada suatu inisiatif jang didjalankan untuk mempeladjar dan meneliti sedjarah Indonesia setjara ilmiah dan lepas dari pengaruh buku2 sedjarah jang disusun terlebih dahulu oleh Belanda dan kaum reaksioner lainnja, jang mempunyai maksud tertentu untuk kepentingan politik ‘memetjah dan memerintah’ (*verdeel en heers*)”. Atas dasar itulah majalah ilmiah ini lahir “untuk memberikan kesempatan kepada para ahli chususnja dan rakjat umumnja, untuk menguraikan buah fikirannja guna kebenaran dan keadilan” (Sumantri 1960: 2).

Di nomor pertama *Penelitian Sedjarah*, terdapat sebuah artikel menarik yang ditulis oleh Soetjipto Wirjosuparto berjudul “Prapantja Sebagai Penulis Sedjarah”. Ini adalah sebuah artikel yang diklaim penulisnya sebagai sebuah ikhtiar untuk mewujudkan upaya menilai ulang penelitian sejarah yang dilakukan oleh para ahli sejarah bangsa Belanda. “Sesuai dengan seruan Pemerintah Republik Indonesia untuk berpegangan kepada USDEK, peranan Prapantja sebagai seorang penulis sedjarah akan saja tindjau dari kepribadian dan kebudajaan Indonesia”, tulisnya (Wirjosuparto 1960: 15). Berbeda dari pandangan para ahli barat seperti Cornelis Cristiaan Berg, sang penulis berpendapat bahwa Prapantja adalah seorang sejarawan. Pertama, ia menulis dengan menggunakan metode sejarah. Kedua, kekurangan yang terdapat di dalam karyanya tidak bisa diukur dengan kemajuan ilmu pengetahuan kontemporer, sebab pada masa itu ilmu sejarah belum semaju sekarang. Ketiga, klaim yang mengatakan bahwa Prapantja itu seorang tukang khayal berarti karyanya dinilai tidak sah dan kesatuan Majapahit bohong belaka. Hal ini merupakan upaya untuk menjatuhkan kemampuan orang Indonesia

¹⁶ Terkait *Penelitian Sedjarah*, H. A. J. Klooster pernah menulis artikel yang cukup komprehensif terkait tema-tema yang dibahas di dalam majalah ilmiah yang terbit sampai tahun 1965, terdiri dari sepuluh nomor. Lihat (Klooster 1986).

kontemporer dalam mengelola wilayah administrasi yang luas, seperti Majapahit di masa lalu.

Dalam kaitannya dengan upaya menafsir sejarah yang sesuai dengan Pancasila, Sutjipto Wirjosuparto membuat rumusan yang lebih konseptual dalam pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Purbakala dan Sejarah Kebudayaan di Universitas Indonesia pada tanggal 27 Januari 1962. Dalam pidatonya yang berjudul “Pantjasila Manipol Usdek Sebagai Dasar Pentafsiran Sedjarah”, ia mengatakan bahwa tafsir sejarah harus dilakukan secara positif, dalam arti penafsiran sejarah harus selalu berada dalam kerangka untuk mendorong tercapainya Revolusi Indonesia (Wirjosuparto 1962: 6–8).

Perlu ditambahkan bahwa tafsir sejarah yang sesuai dengan Pancasila Manipol USDEK memiliki akar dari pidato-pidato yang disampaikan oleh Sukarno. Pertama, pleidoi Sukarno yang cukup terkenal berjudul *Indonesie Klaagt Aan* (Indonesia Menggugat) yang disampaikan di Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 1930 atas tuduhan dengan sengaja telah menyebarkan ucapan yang dianggap mengganggu ketenteraman umum. Dalam pidato ini, ia membuat rumusan konsep waktu yang juga terkenal: “masa silam yang indah, masa kini yang gelap gulita, dan janji-janji suatu masa depan yang melambai-lambai, berseri-seri” (Dikutip dalam Feith and Castles 1988: 5; Lihat juga Wirjosuparto 1962: 3). Kedua, pidato pertanggung jawaban atas dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959, yang disampaikan pada tanggal 17 Agustus 1959. Sebuah pidato yang terkenal dengan sebutan Manipol, Manifesto Politik (Wirjosuparto 1962: 3). Dalam pidato ini ditegaskan perlunya kembali ke rel revolusi yang sudah terlalu diselewengkan dari dasar dan tujuan perjuangan. Dalam pidato ini juga Sukarno menyampaikan pernyataannya yang cukup terkenal: “Menemukan-kembali Revolusi kita” (Feith and Castles 1988: 87–88). Ketiga, pidato yang disampaikan oleh Sukarno pada Hari Proklamasi 17 Agustus 1960 dengan judul “Djalannya Revolusi Kita” yang kerap disingkat Djarek (Wirjosuparto 1962: 4).

Pidato Sukarno tahun 1930 memang merefleksikan cara bagaimana masa lalu dimaknai. Sampai batas tertentu, pidato itu juga merefleksikan sebuah filsafat sejarah nasional, yang di akhir tahun 1950-an sampai dengan awal tahun 1960-an menjadi inspirasi dalam bagaimana sebuah penelitian sejarah dilakukan. Pandangan filsafat sejarah yang disampaikan memang cenderung romantik karena didasarkan pada pandangan yang memuja kemegahan masa lalu dan harapan akan kembalinya kegemilangan itu di masa yang akan datang (Frederick and Soeroto 1982: 25–27). Di paruh pertama tahun 1960-an, pandangan ini tidak berhenti pada romantisme, tapi ada juga upaya untuk membuat rumusan untuk mengaktualisasi nilai-nilai dari masa lalu supaya bisa lebih fungsional dalam menjawab permasalahan kontemporer.

Ini setidaknya yang disampaikan oleh Roeslan Abdulgani dalam pidatonya yang diucapkan sebagai pertanggungjawaban promotor untuk pemberian gelar Doktor *Honoris Causa* di bidang Ilmu Sejarah oleh Universitas Padjadjaran. Sang promotor mengatakan bahwa Sukarno memiliki kemampuan untuk mengurai sejarah secara ilmiah, dalam arti bahwa ia memiliki kemampuan menguasai banyak fakta sejarah – nasional dan internasional – dan juga kemampuan untuk memilah fakta-fakta itu secara hierarkis – mana yang penting dan mana yang tidak penting, mana yang pokok dan tidak pokok – dengan tujuan membuat rangkaian yang bisa menjelaskan suatu fenomena dan menemukan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Selain itu, Roeslan Abdulgani juga mengatakan bahwa Sukarno memiliki kemampuan mengurai sejarah secara revolusioner. Artinya, dalam melakukan tafsir terhadap sejarah, Sukarno berpijak pada filsafat sejarah yang bertentangan dengan tafsir sejarah kolonial. Lebih jauh, Roeslan Abdulgani juga menambahkan bahwa “ilmu sedjarah bagi promovendus [Sukarno]

bukanlah sekedar hafalan tentang rentetan tahun-tahun dengan kejadian-kejadian, tanpa hubungan kausal setjara timbal-balik; melainkan ilmu sedjarah adalah sesuatu jang hidup, suatu ‘source of inspiration, illuminating and fascinating’, suatu ‘guide to action’” (Abdulgani 1965: 8–9). Hal ini dimungkinkan, menurutnya, karena Sukarno mendasarkan cara berpikrnya kepada filsafat Marxisme sebagai metode kerja dan metode berpikir. Demikian, bagi Sukarno, materialisme-historis bukanlah sebuah dogma dan jargon belaka, melainkan sebuah cara dan teori yang paling baik untuk memecahkan persoalan-persoalan sejarah (Abdulgani 1965: 12).

Sukarno sendiri dalam pidatonya ketika menerima gelar Doktor dan Doktor *Honoris Causa* menegaskan apa yang sudah disampaikan oleh sang promotor. Pertama, ia mengatakan bahwa sejarah bukan sekedar urutan peristiwa, tapi juga harus dipahami hukum sebab akibat yang ada di dalamnya. Kedua, untuk melakukan itu, dia menggunakan pisau materialisme historis yang berasal dari tradisi pemikiran Marxisme. (Sukarno 1965: 2). Dengan kerangka itulah, ia menafsir masa lalu Indonesia sebagai penuh eksploitasi ekonomi untuk keuntungan negara-negara kapitalis dan dengan kerangka itu pulalah ia menafsir bahwa masa depan Indonesia akan lebih baik. Ia percaya, bahwa “tidak boleh tidak setjara dialektika kita **bangsa Indonesia akan makin kuat oleh karena gempuran-gempuran dari luar**. Ini jang saja namakan dialektika Revolusi Indonesia [...] makin kita digempur makin kita dihantam, makin hantaman itu sebagai tempaan, tempaan terhadap kepada kita punja tubuh jang membuat tubuh kita itu makin berotot kawat balung wesi” (Sukarno 1965: 7).¹⁷ Dengan mengatakan ini, Sukarno meyakini bahwa dirinya bisa membuat ramalan akan masa depan, yang didasarkan pada pembacaan sejarah yang mengikuti hukum dialektika, sebuah pemikiran yang akarnya bisa ditelusuri sampai ke Abad Pencerahan yang penuh keoptimisan dalam memandang laju sejarah.¹⁸

Di tengah sejumlah percobaan menafsir sejarah agar sesuai dengan kepentingan politik, Mohamad Ali adalah figur yang menarik. Ia mencoba mengombinasikan antara praktik penulisan sejarah yang ideologis tapi tetap setia pada penelitian empiris. Mungkin ia adalah sedikit dari sarjana yang ada pada waktu itu yang mencoba membuat rumusan teoretis dari keilmuan sejarah. Hal itu, bisa dilihat, pertama-tama, melalui penerbitan karyanya yang berjudul *Pengantar Ilmu Sedjarah Indonesia* tahun 1961. Tentu saja ia bukan yang pertama dan satu-satunya orang yang melakukan refleksi teoretis dari ilmu sejarah, sebagaimana sudah kita diskusikan sebelumnya. Namun ia bisa dikatakan sebagai orang pertama yang membuat refleksi itu secara sistematis dalam sebuah buku setebal tiga ratus halaman lebih, yang membuat para pembaca bisa memahami gagasan-gagasannya secara utuh. Wajar saja kalau kemudian, sebagaimana dikatakan oleh Djajusman, Direktur Bhratara, penerbit yang menerbitkan karya Mohamad Ali, bahwa *Pengantar Ilmu Sedjarah Indonesia* adalah buku terbitannya yang paling laku (Surjomihardjo 1979: 162).

¹⁷ Terkait Sukarno dan sejarah, Sumardjo, seorang peneliti dari Lembaga Sedjarah dan Antropologi, menerbitkan sebuah buku berjudul *Bung Karno Sebagai Ahli Sedjarah*, tahun 1965. Karya ini ditulis karena didorong oleh akan dianugerahkannya Doktor *Honoris Causa* dalam Ilmu Sedjarah kepada Sukarno. Buku ini juga tidak dimaksudkan untuk membahas biografi Sukarno, tapi lebih untuk “menunjukkan bahwa Bung Karno benar2 ahli sedjarah, sesuai dengan pendapat2 jang terdapat dikalangan dunia pengetahuan” (Sumardjo 1965: 9). Oleh karena itu, tulisan ini pun, dalam penyusunannya lebih didasarkan pada pembacaan karya tulis Sukarno. Lebih jauh dari itu, penerbitan ini juga dilakukan secara resmi oleh Lembaga Sedjarah dan Antropologi Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan bekerja sama dengan Pengurus Besar Front Nasional (hlm. 5).

¹⁸ Lihat (Hartog 2003 terutama bab 3, "Chateaubriand: entre l'ancien et le nouveau régime d'historicité, hal. 77-112)

Buku tersebut terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama membahas dasar keilmuan sejarah, bagian kedua mendiskusikan pokok persoalan dalam penulisan sejarah Indonesia, dan bagian ketiga adalah upayanya untuk melakukan penjelajahan ke dalam medan sejarah Indonesia. Perhatian utamanya tentu saja adalah persoalan sejarah nasional, sejarah Indonesia, terutama terkait kemungkinan adanya apa yang dinamai sebagai sejarah Indonesia. Mohamad Ali, misalnya, mengajukan pertanyaan “Adakah suatu tjerita-sedjarah jang dapat disebut sebagai Sedjarah Indonesia?” dan “Mungkinkah disusun suatu tjerita-sedjarah jang merupakan Sedjarah Indonesia?” (Ali 1963a: 119). Menurutnya, ada atau mungkin tidaknya hal itu disusun bergantung kepada ada tidaknya bangsa itu sendiri. Jika bangsa itu ada, maka pertanyaan yang kemudian muncul adalah sejak kapan bangsa itu mulai ada dan apakah bangsa itu sendiri memiliki sejarah. Kedua, persoalan siapa yang diceritakan, apakah itu orang Indonesia, asli atau tidak asli, anggota suku-bangsa, atau sebagai bangsa asing seperti Belanda, Jerman, dan Inggris misalnya. Para aktor yang dibahas juga, apakah akan diletakkan dalam ruang Indonesia, ruang daerah, sifat keagamaan atau, kecenderungan berpolitiknya (Ali 1963a: 123). Persoalan-persoalan itulah yang membuat penulisan sejarah Indonesia tidak sesederhana yang dibayangkan karena erat berkaitan dengan apa yang harus dimasukkan dan tidak dalam rangkaian cerita sejarah Indonesia. Ia sendiri menyimpulkan bahwa “pemetjahan masalah penjusunan tjeritera-sedjarah Indoensia itu sangat dipengaruhi oleh pendapat-dasar seseorang. Norma-waktu-pelaku pada hakekatnja dapat dipergunakan untuk dijadikan norma tertentu. Kesatuan ruang-waktu-pelaku itu menghasilkan lukisan Sedjarah Indonesia sebagai perkembangan *kearah* terbentuknja Republik Indonesia” (Ali 1963a: 132). Melalui pernyataan tersebut, Mohamad Ali menegaskan bahwa pada akhirnya cerita sejarah Indonesia adalah kisah pergulatan para individu maupun kelompok menuju terbentuknya Republik Indonesia.

Terkait persoalan penyusunan sejarah Indonesia, perlu juga melihat tulisan lain yang lebih pendek, tapi sangat padat, sebuah artikel berjudul “Beberapa Masalah Tentang Historiografi Indonesia” yang ditulisnya dalam kumpulan tulisan *Introduction to Indonesian Historiography*.¹⁹ Dalam artikel ini, Mohamad Ali mengatakan bahwa “masalah pokok historiografi Indonesia adalah menemukan titik temu antara berbagai sejarah lokal dari bangsa Indonesia dengan sejarah kolonial, dan menentukan bagaimana cara mempersatukannya”. Untuk mewujudkan hal itu, maka diperlukan sebuah kriteria yang bisa membuat sintesis dari sekian banyak cerita yang ada menjadi satu cerita tunggal. Ia berpendapat bahwa “penyatuan alur-alur sejarah ini ke dalam ‘Sejarah Indonesia’ yang memenuhi standar ilmiah yang ketat, akan menjadi ujian untuk menilai mutu penulisan sejarah Indonesia”. Hal ini, ia melanjutkan, hanya bisa dicapai dengan adanya “keseimbangan yang rumit antara imajinasi sejarah dengan data yang faktual”. Itulah mengapa, menurutnya, apa yang menjadi tugas studi sejarah di Indonesia, di antaranya, adalah “merumuskan kemungkinan sintesis, berdasarkan ketentuan-ketentuan teori dan filsafat sejarah, serta berdasarkan sebanyak-banyaknya fakta yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang bertumpuk namun belum diselidiki itu, serta berdasarkan penilaian ulang terhadap data yang sudah ada” (Ali 1995: 8). Pada titik ini, agenda yang ditawarkan oleh Mohamad Ali cukup jelas: melakukan penelitian empiris untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin dan dalam waktu bersamaan melakukan pembacaan ulang terhadap data yang sudah ada.

¹⁹ Buku ini terbit pertama kali dalam edisi bahasa inggris tahun 1965. Terjemahan bahasa Indonesia yang dirujuk dalam tulisan ini terbit tahun 1995.

Meskipun memiliki perhatian terhadap aspek teoretis dari keilmuan sejarah, tentu saja Mohamad Ali tidak bergulat pada tataran itu saja. Ia juga termasuk seorang pemikir sejarah yang mencoba membuat rumusan kesatuan antara teori dan praktik. Tulisannya yang berjudul *Sedjarah dalam Revolusi dan Revolusi dalam Sedjarah*, terbit tahun 1965, adalah upayanya untuk memberikan landasan teoretis dari sudut sejarah akan pentingnya menuntaskan Revolusi Indonesia, sebuah agenda politik yang dicanangkan Manipol Usdek. Dalam pengantarnya ia menulis “Integrasi teori dengan praktek, panunggalan ngelmu dengan laku, perpaduan iman dengan amal-ihsan, luluh-leburan teori-perdjoangan-revolusioner dengan ujud-perdjoangan-revolusioner adalah alas-dasar-mutlak daripada kebesaran manusia sebagai machluk: mentijptakan dan menegakkan tata-kemanusiaan jang dashat” (Ali 1965: 5). Meskipun demikian, ia tampak rendah hati dengan mengatakan bahwa apa yang ia tulis bukanlah suatu teori, dan cara penyusunannya pun tidak dilakukan secara ilmiah. Setidaknya dari apa yang ia sampaikan jelas terlihat komitmen sosialnya sebagai seorang sarjana yang terus bergulat dengan persoalan politik kebangsaan di masanya.

Apa yang menjadi pokok persoalan dalam tulisan ini adalah pembahasan mengenai fungsi sejarah di dalam revolusi, khususnya fungsi sejarah Indonesia dalam Revolusi Indonesia. Untuk itu dia mengatakan bahwa sejarah merupakan unsur yang paling dasar dalam gerak suatu bangsa. Pembangkitan kesadaran sejarah menjadi prasyarat bagi munculnya kesadaran di dalam jiwa yang memuat kesadaran dan keyakinan sehingga orang akan sangat tergerak memberikan sumbangsih kepada sejarah bangsanya (Ali 1965: 14–15). Lebih jauh, ia mengatakan

“bahwa fungsi-sedjarah dalam kenjataan perikehidupan kemanusiaan merupakan sjarat-mutlak dalam perdjoangan Umat Manusia. Sedjarah serba-subjek harus memenuhi fungsinya sebagai dasar-perdjoangan tiap-tiap manusia Indonesia setjara merata dan menjeluruh. Sedjarah Indonesia harus disadarkan, dijakinkan dan dimiliki oleh setiap manusia Indonesia dimanapun djua, sebagai dasar-perbuatan serba-sedjarah, sebagi unsur-mutlak dalam perdjoangan penjelesaian Revolusi” (Ali 1965: 16).

Pandangan teoretis semacam ini, menurut Mohamad Ali, hanya menjadi mungkin dilakukan kalau ada revolusi di dalam ilmu sejarah itu sendiri – sebuah tema yang juga dibahas dalam tulisan ini: “revolusi dalam sejarah”. Artinya, perlu ada upaya untuk mempertanyakan ulang “masalah arah-tudjuan sedjarah, masalah sebab-musabab dalam sedjarah, dan masalah kaidah-sedjarah” (Ali 1965: 20). Dengan mempertanyakan tiga pokok persoalan itu berarti harus dilakukan peninjauan ulang atas kajian sejarah di Indonesia; bahwa studi sejarah Indonesia tidak lagi ditujukan untuk mempelajari masa lalu tanpa ada upaya untuk menghubungkannya dengan masa kini misalnya.

Pernyataan inilah yang cukup jelas dan tegas terkait agenda penulisan sejarah yang ditawarkan oleh Mohamad Ali. Hal ini pulalah yang penting untuk menempatkan kembali Mohamad Ali sebagai seorang pemikir sejarah yang tidak hanya terpesona terhadap masa lalu, tapi juga berupaya menjadikan kajian sejarah bermakna pada masyarakat kontemporer karena sejarah selalu ditulis di waktu kini.

Hubungan antara sejarawan dengan masyarakat tempatnya hidup adalah sesuatu yang tidak bisa dikesampingkan. Perdebatan yang muncul pada paruh pertama tahun 1960 ini menunjukkan hal tersebut. Tuntutan sosial dan komitmen keilmuan seperti sesuatu yang terpisah menjadi tema yang paling sering bersitegang. Gambaran mengenai hal ini,

dengan sangat baik diurai oleh Soedjatmoko pada bagian akhir buku kumpulan tulisan yang ia edit. Ia sendiri memberi judul artikelnya “Sejarawan Indonesia dan zamannya”.

Apa yang dilakukan oleh Soedjatmoko adalah sebuah refleksi yang cukup terang. Ia sangat menyadari bahwa pergulatan seorang sejarawan dengan masa lalu semua itu dilakukan untuk kepentingan masa kini. Ia melanjutkan:

“Perhatiannya terhadap masa lampau, terutama terhadap periode yang ditandai oleh perubahan yang pesat dan revolusioner, ketidakpastian yang bersifat konstan, dan krisis, terkait dan sebanding dengan keterlibatan emosional mereka dengan masa kini dan dengan pencarian mereka akan berbagai jawaban terhadap soal-soal yang melingkupi mereka. Manakala nasionalisme bergelora, sebagaimana yang terjadi di Indonesia, pencarian jawaban-jawaban tersebut tidak berbentuk introspeksi yang kontemplatif atau pencarian yang ulet guna mendapatkan pengetahuan dan penjelasan yang rinci. Upaya itu sebagian besar akan berupa tuntutan-tuntutan mendesak akan penulisan sejarah yang nasionalis serta akan mitos-mitos nasional di mana kepercayaan baru dapat diperoleh dan dukungan dapat diraih”.(Soedjatmoko 1995b: 358)

Pada titik ini, pandangan Soedjatmoko cukup merefleksikan realitas yang dihadapi oleh sejarawan Indonesia. Hal itu pula yang membuat perdebatan terkait bagaimana masa lalu ditulis cukup semarak. Perdebatan antara subjektivitas dan objektivitas dalam historiografi Indonesia tidak dapat dihindarkan. Dalam perkembangan historiografi Barat, perdebatan ini baru muncul belakangan ketika perdebatan mengenai historiografi itu sendiri sudah demikian maju. Sebaliknya, di Indonesia perdebatan ini muncul seiring dengan munculnya tradisi penulisan sejarah modern (hlm. 361). Itulah kenapa, objektivitas perlu dimaknai sebagai sesuatu yang universal, bukan parsial.²⁰

Penutup

Sekalipun sama-sama mendapat inspirasi dari Van Leur, pada praktiknya agenda penulisan sejarah yang Indonesiasentris bukan merupakan sesuatu yang seragam. Setidaknya ada dua cara untuk melihat itu: romantik dan kritik. Pada tataran diskursus, perdebatan juga terjadi pada beberapa lapis yang berbeda: populer, akademik, dan pencampuran keduanya. Sementara itu, dari segi arena, perdebatan yang terjadi di Indonesia juga menjadi bagian dari dimensi global, yang melibatkan para sarjana dari berbagai kebangsaan.

Berdasarkan kenyataan itu, jelas perdebatan historiografi Indonesiasentris tidak hanya terbatas antara Muhamad Yamin dan Soedjatmoko yang sering kali dilihat secara romantik oleh generasi sejarawan setelahnya. Sejumlah sarjana seperti Soetjipto Wirjosuparto, Wiratmo Soekito, dan Mohamad Ali, serta Roeslan Abdulgani juga berupaya membuat tafsiran atas masa lalu Indonesia secara konseptual. Tentu saja, tidak boleh dilupakan keterlibatan para sarjana seperti John Smail dan Justus van der Kroef yang berupaya membuat rumusan terkait persoalan ini.

²⁰ Frasa ini - “Objectivité ne signifie pas impartialité, mais universalité” - berasal dari Raymond Aron dalam bukunya *Introduction à la philosophie de l'histoire: Essai sur les limites de l'objectivité historique* (1938), hal. 9. G. J. Resink mengutip frasa ini dalam artikelnya yang berjudul *Tussen de mythen: Van koloniale naar nationale geschiedsrijving* (1952) melalui Jan Roemin. Lihat (Resink 2012: 53).

Pada titik inilah, mencermati apa yang ditawarkan oleh Van Der Kroef adalah sesuatu yang cukup menarik. Menurutnya tidak ada Eropasentris atau Indonesiasentris dalam penulisan sejarah Indonesia, yang ada hanyalah upaya melihat kemungkinan memperlakukan penduduk lokal dan elemen-elemen dari luar dalam sebuah interaksi spesifik di sebuah tempat dan waktu bernama Indonesia (Kroef 1965: 20). Demikian, dengan menempatkan sejarah Indonesia dalam percaturan persoalan di tingkat global, akan memperkaya perspektif dan mengeluarkan Indonesia dari kecenderungan memproduksi mitos sejarah yang didasarkan pada rekonstruksi masa lalu yang terlalu berorientasi ke dalam. Van Der Kroef merasa khawatir bahwa kecenderungan yang demikian itu lahir dari ambisi akan sebuah pemerintahan nasional terpusat, sebagai oposisi terhadap sistem federal, sebuah pandangan yang menyiratkan bahwa, bukan tidak mungkin, persoalan “NKRI harga mati!” yang menjadi jargon belakangan merupakan buah dari indonesiasentris.

Apa yang disampaikan Van Der Kroef sejalan dengan apa yang sekarang menjadi pokok perdebatan historiografi: sejarah global. Dalam bahasa Enzo Traverso, sejarah global adalah ikhtiar untuk “melihat masa lalu sebagai suatu kesatuan interaksi, pertukaran material (ekonomi, demografi, teknologi), dan transfer kebudayaan (bahasa, keilmuan, dan kesusastraan) dengan mengerangkai seluruh bagian dunia sebagai satu kesatuan jaringan (yang tentu saja hierarkis tapi bersatu)” (Traverso 2012: 9). Van Der Kroef memang tidak menamai kajiannya sebagai sejarah global, tapi apa yang ia tawarkan bisa jadi merupakan jalan keluar dari kebuntuan dalam historiografi Indonesiasentris yang semakin berorientasi ke regiosentris ini.

Semangat kebangsaan sering kali mengabaikan aspek kesalingterkaitan antara berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai tempat berbeda. Begitu pula dengan semangat kedaerahan yang memiliki keyakinan tertutup bahwa peristiwa yang terjadi di satu tempat tidak perlu dilihat dalam kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di tempat lain. Paradigma berpikir seperti itu kerap digunakan sebagai landasan untuk menjustifikasi suatu identitas kelompok tertentu. Demikian, model penulisan sejarah yang seperti ini hanya akan memperkuat sudut pandang yang sempit dalam melihat realitas, melihat masa lalu secara hitam-putih. Di sisi lain, menulis sejarah yang melampaui batas-batas kesukuan dan negara bangsa, membaca masa lalu dalam arus sirkulasi ide-ide, manusia, dan barang-barang di tingkat global akan memberi gagasan tentang bagaimana suatu peristiwa yang terjadi di satu tempat tertentu merupakan buah dari pertemuan berbagai hal. Dalam kerangka ini, sudut pandang yang memberi penekanan berlebih terhadap salah satu pihak – seperti Eropasentris dan Indonesiasentris misalnya – menjadi tidak relevan, sebab analisis akan lebih ditekankan kepada dialektika yang terjadi di antara keduanya. Atas dasar itulah, percobaan untuk mengelaborasi sejarah global sebagai sebuah kerangka analisis menjadi penting untuk diwujudkan.

Daftar Pustaka

- Abdulgani, Roeslan. "Pidato Prof. Dr. H. Roeslan Abdulgani Sebagai Promotor Sewaktu Menganugerahkan Gelar Doctor Dan Doctor Honoris Causa Dalam Ilmu Sedjarah Kepada P.J.M. Presiden Sukarno." *Penelitian Sedjarah* 6 (10), 1965, hlm. 8–14.
- Abdullah, Taufik. "The Study of History." In *The Social Sciences in Indonesia*, edited by Koentjaraningrat. Jakarta: Indonesian Institute of Sciences (LIPI), 1975, hlm. 89–166.
- Aidit, D. N. *Masjarakat Indonesia Dan Revolusi Indonesia*. Djakarta: Jajasan Pembaruan, 1964.
- Alatas, Syed Hussein. "Theoretical Aspects of Southeast Asian History: John Bastin and the Study of Southeast Asian History." *Asian Studies* 2 (2), 1964, hlm. 247–60.
- Ali, Mohamad. *Pengantar Ilmu Sedjarah Indonesia*. Djakarta: Bhratara, 1963a.
- . *Peranan Bangsa Indonesia Dalam Sedjarah Asia Tenggara*. Djakarta: Bhratara, 1963b.
- . *Perjuangan Feodal*. Bandung; Djakarta: Ganaco, 1963c.
- . *Sedjarah Dalam Revolusi Dan Revolusi Dalam Sedjarah*. Djakarta: Bhratara, 1965.
- . "Beberapa Masalah Tentang Historiografi Indonesia." In *Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar*, edited by Soedjatmoko, Mohamad Ali, G. J. Resink, and G. McT Kahin. Jakarta: Gramedia, 1995, hlm. 1–16.
- Avé, J. B. "Pandangan Pendebat." In *Laporan Lengkap Atjara I Dan II Tentang Konsepsi Filsafat Sedjarah Nasional Dan Periodisasi Sedjarah Indonesia*, by Seminar Sedjarah: Yogyakarta; Jakarta, 1958, hlm. 62–64.
- Casparis, J. G. de. "Historical Writing on Indonesia (Early Period)." In *Historians of South East Asia*, edited by D. G. E. Hall. London: Oxford University Press, 1961, hlm. 121–63.
- Coedès, Georges. "Le royaume de Çrīvijaya." *Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient* 18 (1), 1918, hlm. 1–36.
- Crossley, Ceri. *French Historians and Romanticism: Thiery, Guizot, the Saint-Simonians, Quinet, Michelet*. London ; New York: Routledge, 1993.
- Farid, Hilmar. "Pramoedya Dan Historiografi Indonesia." In *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*, edited by Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, and Ratna Saptari. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia: KITLV-Jakarta; Pustaka Larasan, 2008, hlm. 79–110.
- Feith, Herbert, and Lance Castles, eds. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Filliozat, Jean. "I. Notice sur la vie et les travaux de M. Georges Coedès (1886-1969)." *Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient* 57, 1970, hlm. 4–24.
- Frederick, William H., and Soeri Soeroto, eds. *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum & Sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Fruin-Mees, W. *Geschiedenis van Java*. Vol. I. Weltevreden: Commissie Voor De Volkslectuur, 1919.
- Hartog, François. *Régimes d'historicité: présentisme et expériences du temps*. La librairie du XXIe siècle. Paris: Seuil, 2003.
- Jedamski, Doris. "Balai Pustaka : A Colonial Wolf in Sheep's Clothing." *Archipel* 44 (1), 1992, hlm. 23–46.

- Klinken, Gerry van. "The Battle for History After Soeharto: Beyond Sacred Dates, Great Men, and Legal Milestones." *Critical Asian Studies* 33 (3), 2001, hlm. 323–50.
- Klooster, H.A.J. *Indonesiërs Schrijven Hun Geschiedenis*. Dordrecht: Foris Publications, 1985.
- . "Penelitian Sedjarah, Een Indonesisch Geschiedenistijdschrift (1960-1965)." *Tijdschrift Voor Geschiedenis* 99 (3–4), 1986, hlm. 507–16.
- Kroef, Justus M. van der. "On the Writing of Indonesian History." *Pacific Affairs* 31 (4), 1958, hlm. 352.
- . "National and International Dimensions of Indonesian History." *Journal of Southeast Asian History* 6 (1), 1965, hlm. 17–32.
- Leur, J. C. van. *Indonesian Trade and Society: Essays in Asian Social and Economic History*. Bandung: Sumur Bandung, 1960.
- Lombard, Denys. *Nusa Jawa: Silang Budaya; Kajian Sejarah Terpadu. Bag. 1: Batas Batas Pembaratan*. Jakarta: Gramedia, 1996.
- McVey, Ruth T. "The Enchantment of the Revolution: History and Action in an Indonesian Communist Text." In *Perceptions of the Past in Southeast Asia*, edited by Anthony Reid and David Marr. Singapore: Heinemann Educational Books (Asia), 1979, hlm. 340–58.
- Nordholt, Henk Schulte. "De-Colonising Indonesian Historiography." Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 2004.
- Nordholt, Henk Schulte, Bambang Purwanto, and Ratna Saptari, eds. *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia: KITLV-Jakarta; Pustaka Larasan, 2008.
- Notosusanto, Nugroho. "Problems in the Study and Teaching of National History in Indonesia." *Journal of Southeast Asian History* 6 (1), 1965, hlm. 1–16.
- Nursam, M. *Pergumulan Seorang Intelektual: Biografi Soedjatmoko*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Oetomo, Bambang. "Some Remarks on Modern Indonesian Historiography." In *Historians of South East Asia*, edited by D. G. E. Hall. London: Oxford University Press, 1961, hlm. 73–84.
- Purwanto, Bambang. *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!* Jogjakarta: Ombak, 2006.
- Reid, Anthony. "The Nationalist Quest for an Indonesian Past." In *Perceptions of the Past in Southeast Asia*, edited by Anthony Reid and David Marr. Singapore: Heinemann Educational Books (Asia), 1979, hlm. 281–98.
- Reid, Anthony, and David Marr, eds. *Perceptions of the Past in Southeast Asia*. Singapore: Heinemann Educational Books (Asia), 1979.
- Resink, G. J. *Bukan 350 Tahun Dijajah*. Depok, Indonesia: Komunitas Bambu, 2012.
- Saleh, Boejoeng. "Pandangan Pendebat." In *Laporan Lengkap Atjara I Dan II Tentang Konsepsi Filsafat Sedjarah Nasional Dan Periodisasi Sedjarah Indonesia*, by Seminar Sedjarah, Yogyakarta; Jakarta, 1958, hlm. 65–67.
- Sardjito. "Pengantar Kata Oleh Ketua Panitia Seminar Sedjarah." In *Seminar Sejarah Nasional Pertama, 14 - 18 Desember 1957, Yogyakarta. Himpunan Lengkap Kertas Kerja*, edited by Abdurrachman Surjomihardjo. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1976, hlm. 1–5.
- Singhal, D. P. "Some Comments on 'The Western Element in Modern Southeast Asian History.'" *Journal of Southeast Asian History* 1 (2), 1960, hlm. 118–23.

- Smail, John R. W. "On the Possibility of an Autonomous History of Modern Southeast Asia." *Journal of Southeast Asian History* 2 (2), 1961, hlm. 72–102.
- Soedjatmoko. "Djawaban Atas Pandangan2 Para Pendejabat." In *Laporan Lengkap Atjara I Dan II Tentang Konsepsi Filsafat Sedjarah Nasional Dan Periodisasi Sedjarah Indonesia*, by Seminar Sedjarah. Yogyakarta; Jakarta, 1958a, hlm. 81–85.
- . "Merintis Hari Depan." In *Laporan Lengkap Atjara I Dan II Tentang Konsepsi Filsafat Sedjarah Nasional Dan Periodisasi Sedjarah Indonesia*, by Seminar Sedjarah. Yogyakarta; Jakarta, 1958b, hlm. 35–53.
- . "Pendahuluan." In *Historiografi Indoensia: Sebuah Pengantar*, edited by Soedjatmoko, Mohamad Ali, G. J. Resink, and G. McT Kahin. Jakarta: Gramedia, 1995a, hlm. xiii–xxviii.
- . "Sejarawan Indonesia Dan Zamannya." In *Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar*, edited by Soedjatmoko, Mohamad Ali, G. J. Resink, and G. McT Kahin. Jakarta: Gramedia, 1995b, hlm. 358–69.
- Soedjatmoko, and Boejoeng Saleh. *Polemik Soedjatmoko versus Boejoeng Saleh: krisis daya cipta Indonesia*. Edited by M. Nursam. Yogyakarta: Ombak, 2004.
- Soekito, Wiratmo. *Renungan Tentang Sedjarah*. Djakarta: Bhratara, 1961.
- Sukarno. "Indonesia, Ajam-Djantan-Sedjarah Dunia Baru: Pidato P.J.M. Presiden Sukarno Sewaktu Menerima Gelar Doctor Dan Doctor Honoris Causa Dari Universitas Padjadjaran." *Penelitian Sedjarah* 6 (10), 1965, hlm. 1–7.
- Sumantri, Iwa Kusuma. "Kata Pengantar." *Penelitian Sedjarah* 1 (1), 1960, hlm. 2.
- Sumardjo. *Bung Karno Sebagai Ahli Sedjarah*. Djakarta: Balai Pustaka, 1965.
- Supomo, S. "The Image of Majapahit in Later Javanese and Indonesian Writing." In *Perceptions of the Past in Southeast Asia*, edited by Anthony Reid and David Marr. Singapore: Heinemann Educational Books (Asia), 1979, hlm. 171–86.
- Surjomihardjo, Abdurrachman. "Mengenang Sejarawan R. Mohamad Ali (14 April 1912-19 Juni 1974)." In *Pembinaan Bangsa Dan Masalah Historiografi*, by Abdurrachman Surjomihardjo. Jakarta: Yayasan Idaju, 1979, hlm. 159–64.
- Teeuw, A. *Modern Indonesian Literature*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1967.
- Toer, Pramoedya Ananta. *Sedjarah Modern Indonesia: Babak Perintis*. Djakarta, 1964.
- Traverso, Enzo. *L'histoire comme champ de bataille: interpréter les violences du XXe siècle*. Paris: La Découverte, 2012.
- Wertheim, W. F. "Early Asian Trade: An Appreciation of J. C. van Leur." *The Far Eastern Quarterly* 13 (2), 1954, hlm. 167.
- Wirjosuparto, Sutjipto. *Lima Zaman Pendjadjahan Menuju Zaman Kemerdekaan*. Indira, 1958.
- . "Prapantja Sebagai Penulis Sedjarah." *Penelitian Sedjarah* 1 (1), 1960, hlm. 15–22.
- . *Pantjasila Manipol Usdek Sebagai Dasar Pentafsiran Sedjarah*. Djakarta: Djambatan, 1962.
- . "Penulisan Kembali Sedjarah Indonesia." In *Bunga Rampai Sedjarah Budaya Indonesia*, by Sutjipto Wirjosuparto. Djakarta: Djambatan, 1964, hlm. 21–39
- . "Duapuluh Tahun Ilmu Sedjarah Di Indonesia." In *Research Di Indonesia 1945-1965: Bidang Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, edited by Widjojo Nitisastro. Departemen Urusan Research Nasional Republik Indonesia, 1965, hlm. 279–313.
- Yamin, Muhammad. *6000 Tahun Sang Mérah-Putih*. Djakarta: Balai Pustaka, 1958a.

- . “Tjatur-Sila Chalduniah.” In *Laporan Lengkap Atjara I Dan II Tentang Konsepsi Filsafat Sedjarah Nasional Dan Periodisasi Sedjarah Indonesia*, by Seminar Sedjarah. Yogyakarta; Jakarta, 1958b, hlm. 14–34.